BAB III

TEMUAN PENELITIAN

Sebelum menjadi Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, biasanya para anggota dewan tersebut di beri tugas oleh masing-masing partai politiknya untuk menentukan daerah binaan masing-masing. Penentuan tersebut biasanya ditentukan sendiri oleh masing-masing calon anggota DPRD dengan berdasarkan : (1) Tanah kelahirannya masing-masing, (2) Daerah tempat tinggalnya sekarang, (3) Banyaknya koneksi di daerah tersebut (keluarga ataupun relasi), (4) Keterpaksaan karena di beri tugas oleh partai politik asal.

Daerah binaan itulah yang pada perkembangan akhirnya menjadi daerah pemilihan (Dapil) bagi Calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah. Semisal, H. Murdoko, SH (Dapil I), Dr. H. Bambang Sadono, SH, MH (Dapil III), dan Drs. A. Fikri Faqih, MM (Dapil IX) memilih daerah pemilihannya berdasarkan atas pertimbangan tanah kelahiran, tempat tinggal sekarang, dan banyaknya koneksi yang ada di daerah tersebut. Sedang H. Bambang Priyoko, SIP (Dapil III) sebenarnya adalah kelahiran Kutoarjo, Purworejo (Dapil VI) dan M, Riza Kurniawan memilih daerah pemilihannya (Dapil X) lebih karena pertimbangan tempat tinggal sekarang dan banyaknya koneksi di daerah tersebut. Riza sendiri lahir di Wonosobo (Dapil VI).

Setelah mereka duduk di lembaga DPRD Provinsi Jawa Tengah, mereka harus melakukan upaya-upaya untuk menyejahterakan masyarakat, bukan saja di

daerah pemilihannya itu namun juga di seluruh Jawa Tengah. Selain itu, fungsi lembaga perwakilan rakyat adalah mempertegas dan mengandung maksud bahwa rakyat diharapkan ikut berperan dalam menyelenggarakan pemerintahan melalui wakilnya yang ada di DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tegasnya, pelaksanaan demokrasi di bidang politik menyangkut hubungan yang kondusif antara wakil rakyat di DPRD dan peran serta aktif masyarakat dalam membangun demokrasi dan pemerintahan.

Pimpinan DPRD sebagai wakil rakyat harus mengerti apa yang diinginkan oleh masyarakat. Maka dari itu, Pimpinan DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat harus melakukan komunikasi politik yang konsisten dengan masyarakat yang menjadi konstituennya. Komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD merupakan kontak antara wakil rakyat dan konstituen di daerah pemilihannya masing-masing.

Dalam melakukan komunikasi politik dengan konstituennya pada masa reses, anggota DPRD menjalankannya dalam bentuk komunikasi politik melalui tatap muka dan dialog serta kunjungan ke lapangan untuk meninjau proyek kegiatan sosial yang akan/telah dibantu melalui dana APBD melalui bantuan sosial. Ketika anggota dewan datang untuk menemui konstituennya di masa reses, tidak ada bantuan dana secara langsung yang harus diberikan oleh anggota dewan kepada konstituennya. Namun, sebagain dari masyarakat banyak menganggap kedatangan para wakil mereka di legislatif akan memberikan dana tunai kepada masyarakat baik itu. Berupa uang sebagai ganti ongkos transportasi ataupun dana tunai yang diminta untuk bantuan sosial.

Padahal, anggota dewan tidak mempunyai dana taktis untuk diberikan kepada konstituennya sesuai dengan peraturan perundangan, melainkan pemerintah provinsi yang memegang dan mengatur keuangan DPRD. Jika ada keinginan secara formal dari anggota dewan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat harus mendapat persetujuan dari pemerintah provinsi.

Masyarakat pemilih yang merupakan konstituen dari wakil rakyat di daerah pemilihan merasa kunjungan anggota DPRD harus disertai oleh bantuan dana secara langsung. Hal ini menjadi dilema dikarenakan Aspirasi yang didapatkan dari masyarakat umumnya berupa aspirasi yang memerlukan biaya yang besar. Hal ini tergambar pada kegiatan reses I, II, dan III tahun 2010 anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Periode 2009-2014 di daerah pemilihan masing-masing.

Reses bagi pimpinan dewan adalah cara untuk mendapatkan kembali momen kebersamaan dan saling berbagi dengan masyarakat. Sebagai wakil mereka Pimpinan Dewan selalu menyempatkan diri untuk saling berbagi apa saja, mendengarkan keluhan, keinginan dan berbagai isi hati yang kemudian dibundel dalam laporan reses. Tidak hanya untuk dilaporkan, berbagai *point* aspirasi itu kemudian diusahakan untuk diperjuangkan. Perjuangan itulah yang kemudian menunjukkan kualitas seorang angota dewan, apakah layak dipercaya sebagai wakil, atau bukan. Itulah yang menyebabkan terkadang seorang wakil rakyat seringkali bersuara keras dalam setiap rapat, pembahasan anggaran, maksudnya untuk mendapatkan alokasi bagi aspirasi rakyat di zona pemilihannya masing-masing.

Untuk dapat mengetahui secara benar aspirasi atau keinginan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat serta mengupayakan realisasinya sesuai dengan keinginan dari seluruh rakyat tersebut, maka para wakil harus mengadakan dan melaksanakan mekanisme komunikasi politik secara teratur. Harus ada perhitungan yang matang tentang anggaran bagi anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya.

Secara umum kegiatan masa reses anggota dewan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut[39] : (1) Rapat membicarakan rencana persiapan reses, menyusun jadwal, materi kegiatan, serta memilih koordinator dan personal struktur tim, (2) Menghadiri pertemuan dengan konstituen di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah kecamatan ataupun kelurahan, dalam rangka mengkomunikasikan tugas, peranan anggota DPRD, kiprah di legislatif, serta informasi reses dewan ke daerah pemilihan, (3) Silahturami dengan masyarakat ketika anggota dewan turun ke lapangan menemui konstituennya secara langsung.

Hasil-hasil dari kegiatan reses ini akan menjadi bahan bagi anggota dewan untuk menyusun program pembangunan ke depan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama satu tahun yang dianggarkan di dalam APBD Provinsi Jawa Tengah baik murni maupun perubahan.

3.1 Gaya Komunikasi

Dalam kegiatan reses ini pula, masing-masing Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan gaya komunikasi yang sedemikian rupa untuk merawat konstituennya. Sejatinya menjalin komunikasi yang baik kepada konstituen adalah

untuk kepentingan pribadi anggota dewan yang bersangkutan. Misalnya kalau anggota dewan tidak pernah menjalin komunikasi yang intensif kepada konstituennya tentu tidak ada harapan periode berikutnya anggota dewan tersebut akan terpilih kembali. Tapi hal ini berbeda jika keinginan anggota dewan untuk periode berikutnya tidak ingin terpilih kembali (ingin pensiun).

Dalam reses inilah kesempatan tersebut dipergunakan Pimpinan DPRD Jawa Tengah dengan maksimal. Hal ini dikarenakan kegiatan reses mendapat dana operasional yang diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Provinsi Jawa Tengah. Tentu beda dengan kegiatan temu konstituen biasa yang operasionalnya harus di tanggung secara pribadi dari anggota dewan tersebut.

Menurut UU No. 27 tahun 2009 tentang Susunan kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Pasal 300 poin h, i, j, dan k menyebutkan bahwa Anggota DPRD provinsi mempunyai kewajiban : (h) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, (i) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, (j) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan (k) Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kemudian peraturan tersebut diperkuat dengan Tata tertib DPRD Provinsi Jawa Tengah Bagian ke dua pasal 74 tentang Reses : (1) Masa reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat 3 dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali masa reses, (2) Masa reses dipergunakan oleh Anggota DPRD

Provinsi Jawa Tengah secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat, (3) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD, (4) Jadwal dan kegiatan acara selama reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Dialog dan tatap muka adalah bentuk komunikasi politik yang merupakan dari hubungan satu kepada satu atau satu kepada banyak. Bentuk ini terjadi ketika anggota DPRD datang untuk melakukan pertemuan dan dialog dengan konstituenya. Dengan Dialog dan tatap muka ini adalah cara yang efektif dalam mengetahui secara langsung apa yang diinginkan oleh masyarakat.

Kelima pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah memiliki gaya komunikasi yang berbeda-beda satu sama lainnya. Gaya komunikasi yang berbeda itulah yang akhirnya menjadi ciri khas mereka dalam membangun komunikasi dengan konstituen. Mereka menggunakan gaya komunikasi disesuaikan dengan tipologi masing-masing konstituen dan juga latar belakang kepribadian ataupun pendidikan mereka.

Dalam pertemuan dengan masyarakat akan terungkap apa yang menjadi persoalan di tengah masyarakat. Sudah seharusnya dalam pelaksanaan komunikasi untuk mendapatkan informasi yang relevan diadakan dengan terbuka. Artinya pihak-pihak yang terlibat dalam proses komunikasi dipertemukan untuk bersama menyampaikan kepentingan mereka.

Prosesnya, pimpinan DPRD melakukan dialog secara langsung. Seperti forum-forum pertemuan pada umumnya, diawali dngan pimpinan DPRD menyampaikan materi resesnya yang berupa hasil kinerjanya, informasi tentang pembangunan Jawa Tengah terkini, agenda partai politik. Setelah itu mereka memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pendapat maupun pertanyaan untuk dibicarakan bersama dalam pertemuan itu.

Pada saat dialog itu dilakukan akan menghasilkan kesepakatan bersama tentang jalan keluar dari permasalahan yang mencuat dalam dialog. Biasanya dalam kegiatan dialog dan tatap muka itu terjadi pertukaran informasi yang diselingi adu argumentasi antara anggota DPRD dengan masyarakat tentang permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat.

Agar kegiatan reses untuk bertemu dengan konstituennya berjalan dengan baik, anggota DPRD terlebih dahulu mempersiapkan materi apa yang akan dibicarakan dengan konstituennya. Dalam proses ini, seorang pimpinan DPRD harus benar-benar dapat mengerti dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini akan menghasilkan masukan yang baik dari masyarakat, sehingga kebijakan yang dibuat nantinya merupakan keinginan dari masyarakat.

Pertemuan anggota dewan dengan konstituennya yang dilakukan pada masa reses biasanya difasilitasi dan diselenggarakan oleh pemerintah daerah (Kab/kota, kecamatan, ataupun kelurahan/desa), struktur partai politik daerah (Kab/kota, kecamatan, ataupun kelurahan/desa) dimana Pimpinan DPRD bernaung, Tokoh masyarakat/agama dimana pihak penyelenggaran telah mengundang perwakilan dari masyarakat yang akan menyampaikan aspirasinya

kepada pimpinan dewan secara pribadi ataupun berkelompok anggota dewan mengadakan kunjungan kerja ke daerah pemilihan dengan mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh masyarakat.

Dengan demikian, anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2009-2014 dapat berperan cukup luas dan penting dalam mengemban tugasnya sesuai dengan mandat yang diberikan rakyat pemilih kepadanya. Namun demikian DPRD yang bekerja dalam suatu sistem politik untuk mengutamakan hasil yang berupa keputusan atau kebijaksanaan bagi kepentingan rakyat, maka sangat memerlukan input yang meliputi tuntutan dan informasi-dukungan dari masyarakat.

Ketika melakukan komunikasi politik tersebut, akan didapatkan informasi yang berbentuk tuntutan maupun dukungan yang kemudian masuk ke dalam proses pembuatan keputusan atau kebijaksanaan. Kemudian setelah diproses, maka keluarlah keputusan atau kebijaksanaan yang merupakan output yang dikomunikasikan kepada lingkungan masyarakat sebagai umpan balik untuk memperoleh input kembali dan seterusnya. Diperlukan keterbukaan dari semua pihak, baik pimpinan DPRD, pihak eksekutif (pemerintah daerah) maupun masyarakat secara keseluruhan, sehingga semua informasi dan data yang diperoleh melalui interaksi yang dimaksud adalah mencerminkan kehendak dari seluruh rakyat.

Kegiatan dalam reses selanjutnya adalah kunjungan ke lapangan. Biasanya saat melakukan kunjungan ke lapangan, Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah melakukan dengan santai. Para narasumber menerangkan, berbeda pada saat acara

tatap muka dan dialog yang di beberapa tempat harus mengikuti aturan protokoler resmi dari partai politik masing-masing pimpinan dewan. Untuk kegiatan kunjungan ke lapangan ini ada pimpinan dewan yang harus susah payah meninjau lokasi lapangan.

Dalam kegiatan reses, pimpinan DPRD melakukannya secara langsung. Tanpa perantara dalam mendapatkan informasi langsung dari masyarakat dapat memberikan masukan yang betul-betul merupakan keinginan dari masyarakat.

Ada beberapa tahapan sebuah aspirasi masyarakat diteruskan untuk menjadi sebuah kebijakan. Anggota DPRD mengisi masa reses dengan melakukan komunikasi politik dengan konstituennya untuk mendapatkan informasi, yang kemudian dilanjutkan dengan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota/kabupaten. Hasil dari reses yang dilakukan anggota DPRD akan diperjuangkan ketika anggota DPRD melakukan penyusunan anggaran dengan pemerintah Provinsi dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD).

Banyaknya aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRD ketika masa reses harus diatasi dengan lebih memfokuskan kepada hal-hal yang menjadi prioritas. Semua aspirasi dari masyarakat merupakan informasi yang berguna bagi pembangunan. Namun dalam pelaksanaannya banyak kendala yang membuat semua aspirasi dari masyarakat tidak terpenuhi.

DPRD Provinsi Jawa Tengah dituntut untuk lebih aktif, dinamis dan berupaya untuk melaksanakan tugas serta kegiatan yang dapat mengarahkannya kepada realisasi apa yang menjadi kewajibannya, terutama dengan melaksanakan

komunikasi politik. Dalam hal ini komunikasi politik yang dimaksud adalah kegiatan komunikasi yang dilakukan DPRD Provinsi Jawa Tengah baik di dalam internal sendiri maupun dengan masyarakat Provinsi Jawa Tengah serta instansi-intansi lain dalam pemerintahan daerah. Berikut gaya komunikasi politik Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah pada saat kegiataan reses pada masa persidangan I, II, dan III tahun 2010.

3.1.1. H. Murdoko, SH : Gaya Komunikasi Melepaskan

Sebagai Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah yang telah menjabat selama 2 periode (2004-2009 dan 2009-2014) Murdoko tidak begitu susah dalam melakukan komunikasi politik kepada konstituennya. Apalagi ia ada seorang Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Tentunya dengan kelebihan ini, pendekatan saat reses di rasakan sangat mengena bagi konstituen.

Untuk penentuan lokasi dan bentuk acara kegiatan reses, Murdoko lebih sering spontanitas tanpa ada perencanaan matang sebelumnya. Menurut Wirandiyo[40], Murdoko lebih sering mengatur staf sekretarisnya berkenaan dengan jadwal kegiatan reses, walaupun seharusnya staf pribadinya yang mengatur protokoler kegiatan pimpinan dewan. Dengan kata lain, ia sering *nggampangke* (menganggap mudah) pelaksanaan reses.

> *"Kadangkala pelaksanaan kegiatan reses yang dilaksanakan Pak Murdoko walaupun sudah di rencanakan sebelumnya, tapi pada saat pelaksanaannya rencana itu dapat berubah. Mungkin karena ia sangat reaktif dalam menuruti keinginan konstituennya, sehingga perubahan secara spontanitas pelaksanaan reses itu sering terjadi",* ungkap Wirandiyo.

Di sisi lain, PDI Perjuangan sebagai partai peraih suara terbanyak di Jawa Tengah semenjak pemilu yang di adakan di era reformasi ini (1999, 2004, dan 2009) memiliki kharakteristik konstituen yang khas di bandingkan partai politik lainnya yang ada. Konstituen PDI Perjuangan di kenal sebagai kader partai yang memiliki loyalitas yang tinggi terhadap partainya.

Menurut Abang Baginda[41], Loyalitas kader PDI Perjuangan terbentuk karena : (1) Kecintaan kader terhadap Figur Soekarno yang merupakan bapak kaum nasionalis dan representasi Megawati sebagai anak Soekarno, (2) Ideologi Marhaen[42] yang di bawa Soekarno, (3) Partainya *wong cilik*, (4) Identik dengan partai *Abangan*[43].

Namun, narasumber ini tidak mampu menerjemahkan ataupun mengidentifikasikan dengan jelas siapakah yang dimaksud dengan *wong cilik* dalam terminologi PDI Perjuangan. Mereka hanya mengatakan, yang dimaksud dengan *wong cilik* adalah mereka yang mempunyai penghasilan tapi tidak mencukupi kebutuhan hidupnya, memiliki pendidikan rendah, orang miskin dan masyarakat yang terpinggirkan masyarakat termarginalkan yang susah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Karakteristik konstituen PDI Perjuangan menyebabkan soliditas dan penggalangan mesin partai dapat dilakukan dengan cepat. Di samping itu, pemeliharan terhadap basis massa merupakan faktor penting untuk menjaga soliditas partai dan rasa *"nduweni"* kader atas PDI Perjuangan.

Oleh karena itu, loyalitas para pemilih tersebut merupakan modal utama PDI Perjuangan dalam menentukan setiap gerak langkah partai setiap saat. Perlu

diingat, konstituen dan kader-kader PDI Perjuangan yang masih solid berusia diatas 55 tahun. Sekalipun yang muda-muda diprediksi lebih besar dari parpol lain. Apalagi parpol-parpol baru.

Namun aset-aset yang sudah ada (kader dan konstituen tua) ini adalah harga politik yang tinggi. Kader tua adalah aset lama, mereka adalah simpatisan Partai Nasional Indonesia (PNI) yang merupakan embrio dari PDI Perjuangan. Namun demikian, mayoritas kader PDI Perjuangan memiliki loyalitas "buta"[44] kepada partai, mereka hanya setia kepada bentuk fisik partai secara utuh kepada simbol partai, seperti ketua umum, logo, bendera. Mereka tidak begitu paham mengenai program partai ke depan, dan bagaimana merealiasasikan program tersebut sebagai sebuah tujuan.

Baginda mengibaratkan PDI Perjuangan seperti Partai Kongres di India yang masih membutuhkan figur kuat dari keturunan Gandi. "PDI Perjuangan kira-kira juga sama, trah Bung Karno masih dibutuhkan sebagai perekat partai sekaligus sebagai simbol partai yang harus dituruti segala perintahnya," katanya.

Dominasi PDI Perjuangan di Jateng tidak lepas dari menguatnya relasi politik dan budaya di provinsi ini. Ia melihat, identitas konstituen PDI Perjuangan berbanding lurus dengan identitas kaum abangan dan kejawen yang begitu mengakar kuat di Jateng. Menurut Abang Baginda, pernyataan orang yang mengaku sebagai simpatisan PDI Perjuangan itu sekaligus menjadi pernyataan identitas kultural mereka sebagai orang Jawa dan bukan sekadar identitas politik saja. Partai adalah tempat bersatu *guyup* dan rukun.

Mereka beranggapan, ketika ada kegiatan partai maka sudah menjadi kewajiban untuk menghadirinya. Tidak peduli mereka diundang atau tidak, mengerti acaranya atau tidak. Yang penting adalah kehadiran. Bagi mereka, Partai adalah rumah besar di mana kader yang di dalamnya merasa menjadi bagian dari keluarga besar yang menghuni rumah itu. Contoh implikasinya, PDI Perjuangan dianggap sebagai "Rumah Besar Kaum Marhaenis".

Faktor inilah yang menyebabkan setiap kegiatan reses yang dilakukan oleh anggota DPR/DPRD selalu dipadati oleh konstituen walaupun mereka berasal di luar undangan. Kedatangan kader/konstituen PDI Perjuangan di saat pelaksanaan kegiatan reses hanya dikarenakan tertarik kepada program-program jangka pendek saja. Seperti uang yang di berikan pada saat reses yang biasanya pihak penyelenggara memberikan sedikit uang transportasi kepada konstituen dengan kisaran antara Rp. 15 ribu sampai Rp. 25 ribu, hidangan makanan, sampai fasilitas organ tunggal.

> *"Kalau pada periode 2004-2009, uang transport untuk konstituen memang dianggarkan oleh APBD yang besarnya Rp. 75.000 per orang. Dan biasanya kalau di PDI Perjuangan, ketika mengundang 300 orang yang hadir ada 500 orang. Untuk itu, kita harus pintar mengatur uang yang ada tersebut, sehingga mereka kebagian uang semua",* terang Wirandiyo.

Wirandiyo menambahkan, pemberian uang transport itu dilakukan pada saat acara reses tersebut selesai diselenggarakan. Karena jika di berikan di awal pelaksanaan kegiatan reses, di khawatirkan mereka akan meninggalkan lokasi sebelum acara tersebut selesai dilaksanakan. Pengaturan ini penting dilakukan sehingga acara reses bisa sukses.

> *"Sebetulnya motivasi kedatangan mereka sebagian besar adalah karena ada uang itu. Jika uang diberikan di saat mereka datang mengisi buku*

tamu, biasanya sebelum acara selesai mereka akan pulang terlebih dahulu. Maka untuk menjaga kekondisfan forum, uang itu kita berikan di akhir acara", tambah Wirandiyo.

Khusus untuk fasilitas Organ tunggal memang agak wajib di tampilkan pada saat reses. Organ tunggal ini merupakan pemecah kebekuan suasana saat reses. Biasanya para kader maupun simpatisan PDI Perjuangan bergembira dengan menyanyi ataupun berjoget bersama. Walaupun Murdoko tak bisa bernyanyi, tapi ia tidak menolak ketika ada ajakan untuk berjoget bersama.

Diadakannya berbagai fasilitas di atas sebetulnya dimaksudkan sebagai langkah modifikasi agar apa yang disampaikan anggota dewan tersebut dapat diterima dengan baik oleh konstituennya masing-masing. Tentu saja hal tersebut dilakukan dengan melihat tipologi konstituen dari PDI Perjuangan itu sendiri.

Pada saat tatap muka dan dialog, komunikasi yang dilakukan Murdoko berlangsung secara formal dan kaku. Hal ini di karenakan kegiatan reses lebih banyak dilakukan pada acara-acara formal partai. Walaupun acara di selenggarakan di kantor Pengurus Anak Cabang (struktur PDI Perjuangan tingkat kecamatan), kesan formal tidak bisa dihilangkan karena terdapat serimonial/protokoler acara.

Terdapat juga podium lengkap dengan tempat duduk bagi nara sumber (Murdoko dan pimpinan partai lainnya) serta tempat duduk bagi *audience.* Posisi inilah yang menimbulkan jarak komunikasi dan mendukung proses komunikasi berlangsung secara formal.

Sebelum memulai sambutannya, biasanya Murdoko melakukan pekik "Merdeka". Pekik "Merdeka" memang telah menjadi tradisi dari PDI Perjuangan

sebagai salam khas kebangsaan bagi kader yang akan berorasi ataupun bertemu sesama kader PDI Perjuangan dalam suasana formal.

Menurut Abang Baginda, Pekik “Merdeka” adalah untuk mengingatkan para kader akan semangat perjuangan *founding fathers* kita saat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Juga sebagai salam untuk memupuk nasionalisme kebangsaan kita. pekik "Merdeka" bisa menyatukan semangat serta menepis perbedaan seluruh elemen bangsa.

> *“Jadi sangatlah wajar jika Pak Murdoko sebagai ketua Partai melakukan pekik “Merdeka”dalam setiap sambutannya. Termasuk dalam kegiatan reses yang notabenenya adalah pertemuan dia dengan konstituen dan kader PDI Perjuangan”,* kata Baginda.

Murdoko memang bukan seorang orator ulung seperti Bung Karno yang di idolakan oleh seluruh konstituen PDI Perjuangan. Ia merupakan tokoh yang tidak banyak bicara ketika di podium, gaya bicaranya sedikit ngelantur serta tidak nyambung perihal apa yang dibicarakan, dan sering spontanitas, apa yang ada dalam kepalanya diungkapkan secara langsung.

Saat penyampaian materi reses, kadang ia menggunakan bahasa Jawa halus *(kromo)* kepada konstituennya, apalagi kalau di forum itu terdapat konstituen senior *(sepuh)*, walaupun ia tidak menguasainya. Akhirnya gaya bicaranya malah campur aduk antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa halus.

Menurut Ibnu Syahri[45], Murdoko adalah tipe orang yang menyukai hal-hal yang praktis. Ia tidak suka ber*tele-tele* dalam berbicara, malah kadang ia suka berbicara *ceplas-ceplos*. Apa yang ada dalam pikirannya, itu yang langsung diomongkan. Murdoko juga tidak pernah menggunakan bahasa tubuhnya saat pidato. Hanya pandangan matanya yang senantiasa tertuju kepada *auidence.*

Untuk memecahkan kebekuan suasana, tak jarang ia menyampaikan *joke*/humor, karena kadang itu dipaksakan malah akhirnya menjadi tidak lucu. Syahri menuturkan, "karena beliau adalah pimpinan partai, maka untuk menghormatinya *audience* akhirnya tertawa juga. Walaupun ada kesan itu adalah dipaksakan".

Sebagai seorang tokoh sentral di PDI Perjuangan, tak mengherankan bila ia *over confidence* dalam penampilannya karena itu adalah tuntutan dan menambah wibawanya di hadapan konstituennya. Dari penampilannya saat melakukan reses ia tampak sering menggunakan pakaian stelan warna hitam yang sering digunakan kader dan simpatisan PDI Perjuangan pada umumnya.

> *"Stelan pakaian warna hitam merupakan ciri khas kaum nasionalis. PDI Perjuangan yang merupakan partai nasionalis juga melakukan hal demikian. Warna hitam juga memiliki makna tersendiri: Warna hitam melambangkan ilmu jawa yang paling tinggi atau dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi yaitu pemahaman manusia dari mana mereka berasal dan pasti akan kembali ke asalnya. Kedua, warna hitam adalah warna yang paling konsekuen, artinya apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan, apa yang dirasakan, apa yang diucapkan dan apa yang diperbuat harus sama dan konsekuen. Begitu pula kader PDI Perjuangan yang harus konsekuen, se iya se kata antara ucapan dengan perbuatan*", terang Baginda.

Murdoko memang sering tidak menghabiskan waktu yang diberikan panitia kepadanya untuk memberikan sambutan. Ia masih banyak menggunakan catatan-catatan kecil sebagai referensinya. Kadangkala malah hanya memberikan arahan sebentar kemudian menyerahkannya kepada pendamping juntuk menjelaskan permasalahan lebih rinci. Wirandiyo teringat ketika mendampingi Murdoko, ada materi reses yang tidak dimengertinya dan kemudian Murdoko bertanya kepadanya, *"Menurutmu gimana*? *Sudah kamu yang meneruskan dan menerangkan selanjutnya",* kata Murdoko.

Menurut para nara sumber, Murdoko selalu mengajak pendamping untuk menyampaikan pokok pikiran materi reses. Sementara ia lebih senang ketika ia banyak mendengar. Sikap ini diartikan Syahri sebagai salah satu kekurangmampuan SDM dari Murdoko sendiri. Dalam hal ini, Wirandiyo menjelaskan, ada kebiasaan di PDI Perjuangan untuk menghindari sesi tanya jawab pada saat kegiatan reses saat acara formal berlangsung. Karena, mereka menganggap kurang sopan apabila menanyakan sesuatu secara langsung di muka umum.

> *"Memang ada perasaaan segan atau rasa canggung untuk mengungkapkan pikiran ataupun perasaan saat acara formal. Mungkin kalau bertanya bisa di anggap kurang sopan. Tapi sebaliknya jika acara formal selesai, kader dan simpatisan PDI Perjuangan akan dengan mudah bergaul dengan pimpinan mereka. Saat ini ibarat tidak ada sekat diantara mereka. Ibarat orang tua menerima keluh kesah anaknya.",* terang Wirandiyo.

Namun keterangan berbeda disampaikan Suharyoso[46]. Menurutnya, konstituen PDI Perjuangan sebagian besar berasal dari kalangan *wong cilik*. Sehingga apa yang disampaikan pada saat reses kurang dipahami oleh konstituen itu.

> *"Konstituen PDI Perjuangan kan berasal dari kaum wong cilik. Mereka sangat menyenangi acara-acara perkumpulan partai politik yang diselenggarakan oleh struktural partai. Walaupun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui dengan pasti acara apa yang sedang diselenggarakan itu",* terang Suharyoso.

Namun, inilah yang malah disukai oleh para konstituennya. Ketika materi yang disampaikan sedikit, otomatis waktu penyampaiannya juga relatif singkat. Dengan demikian, acara formal kegiatan reses akan cepat selesai. Dan setelah itu,

“acara inti” yang ditunggu-tunggu oleh tamu undangan segera di mulai yaitu ramah tamah (makan dan hiburan).

Berbeda dengan saat acara formal tadi berlangsung, saat inilah antara Murdoko dengan konstituennya benar-benar bisa menyatu, ibarat tak ada jarak komunikasi diantara mereka. Konstituen banyak menyampaikan aspirasinya di saat seperti ini, karena dengan mudah mereka bisa ngobrol langsung dengan Murdoko. Sebaliknya, Murdoko akan menjawab pertanyaan ataupun aspirasi yang datang kepadanya dengan santai.

Saat acara ramah tamah ini, biasanya Murdoko lebih suka mendengar apa aspirasi yang di sampaikan konstituen kepadanya. Mulai dari keluh kesah mengenai uang saku, permintaan sumbangan untuk acara pernikahan ataupun sunatan, permintaan seragam untuk satgas PDI Perjuangan, sampai permintaan bantuan sosial.

Di lain pihak, ketika ia bertemu dengan orang yang dianggap senior olehnya, Murdoko lebih banyak meminta nasehat. Walaupun posisinya adalah Ketua DPRD maupun Ketua DPD PDI Perjuangan, ia tak segan dan malu untuk meminta nasehat dan arahan[47].

Murodoko lebih banyak mendengarkan apa yang disampaikan oleh kader dan konstituennya, kemudian tidak malu untuk bertanya. Mulai dari pertanyaan yang sifatnya klise seperti apa kabar ? bagaimana keadaannya ? keluarga dirumah baik-baik saja? sampai dengan pertanyaan yang mengarah kepada persoalan serius. Seperti kesiapan menghadapi pilkada dan perolehan suara yang akan di dapat oleh pasangan calon yang di usung oleh PDI Perjuangan.

Contoh kongkritnya adalah pada saat pelaksanaan reses masa persidangan I yang dilaksanakan tanggal 22-27 Maret 2010. Pada masa reses ini, Murdoko melakukan kegiatan reses tiga hari pertama hanya di Kabupaten Kendal saja. Pelaksanaan kegiatannya cukup padat.

Mulai pertemuan dengan masyarakat, simpatisan, dan pengurus PDIP Kabupaten Kendal di kantor DPC PDIP Kabupaten Kendal pada Hari Senin 22 Maret 2010. Kemudian peninjauan beberapa mushola dan pertemuan masyarakat di Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten kendal pada Hari Selasa 23 Maret 2010. Dan terakhir pada Hari Rabu 24 Maret 2010, Murdoko mengadakan temu Kader di Gedung Pertemuan Promas Green Land Desa Nglimut Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Saat pelaksanaan reses tersebut selain penggalian aspirasi juga dilakukan konsolidasi penggalangan suara untuk memenangkan pasangan calon Bupati Kabupaten Kendal dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM-H. Muh. Mustamsikin, S.Ag, Msi yang diusung oleh PDI Perjuangan[48]. Murdoko memang tampak *all out* mendukung pasangan ini. Selain sebagai Ketua Partai di tingkat Jawa Tengah, ia berasal dari Kabupaten Kendal. Dan secara pribadi Widya Kandi adalah kakak ipar dari Murdoko sendiri.

Contoh lainnya, pada saat temu kader dan konstituen di kantor PAC PDIP Tengaran Kabupaten Semarang yang di selenggarakan pada hari Senin, 19 Juli 2010. Pada saat acara reses untuk penggalian aspirasi ini juga diselingi untuk konsolidasi kader dan konstituen PDI Perjuangan untuk memenangkan pasangan

calon Bupati Kabupaten Semarang dr. Mundjirin-Warnadi yang di usung oleh PDI Perjuangan[49].

Pelaksanaan reses anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berlangsung tanggal 19-24 Juli 2010 berdekatan dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Semarang yang akan diselenggarakan pada Hari Sabtu, 31 Juli 2010. Ketika reses diisi dengan Kampanye Pilkada, maka materi reses yang disampaikan adalah soal pemenangan pasangan calon dalam pilkada itu.

Pencampuran antara kegiatan reses dan konsolidasi internal partai untuk memenangkan pilkada di daerah adalah hal yang wajar. Karena sebagai seorang ketua partai, Murdoko memiliki tugas dan tanggungjawab untuk memenangkan setiap pemilu termasuk Pilkada di daerahnya.

Murdoko juga memberikan perhatian kepada konstituen yang diampunya hingga ke tingkat bawah *(grassroot).* Bentuk perhatian itu yakni, ketika dimintai sumbangsih untuk mendukung kegiatan masyarakat dan partai, ia selalu siap membantu dan mengayomi konstituennya. Menurut Joko[50], *"Ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban anggota legislatif terpilih kepada konstituennya. Mereka selalu siap dan itu harus. Karena mereka itu dipilih dari rakyat konstituennya".*

Joko mengatakan, pemeliharaan hubungan ini tidak hanya terbatas pada permintaan sumbangan saja. Namun, Murdoko selalu menjalin komunikasi dan koordinasi untuk menyikapi persoalan yang ada di tingkat masyarakat. Hal berbeda justru dikemukakan Abang Baginda yang mengatakan, hubungan yang dibangun dengan kader selama ini tidak lepas dari pemberian "gizi" kepada kader-

kader yang ada di bawah. Ia menyatakan, mustahil kerja-kerja politik dapat berjalan tanpa ada "materi" yang dikeluarkan.

Menurut para narasumber internal PDI Perjuangan, pola pemeliharaan ini biasanya didasarkan pada ikatan ideologis dan kecintaan kader terhadap partai. Partai tidak pernah memberikan imbal balik berupa materi kepada kader-kader yang ada di bawah. Justru kader-kader PDI Perjuangan seringkali bergotong-royong untuk membiayai kegiatan partai.

Meski, gotong-royong itu sendiri bukan sesuatu yang mudah dilakukan pada era pragmatisme politik seperti saat sekarang. Namun PDI Perjuangan menerapkan pola gotong royong setidaknya ada tiga dimensi yang bisa dikenali sekaligus dipraktikkan kader partai.

Satu, dimensi dari gotong royong adalah niat. Dimana setiap orang yang hendak menjejakkan kakinya dalam ranah politik atau untuk masuk dalam kepengurusan partai tergantung pada niatannya. Dua, gotong-royong dalam proses kepemimpinan. Dalam arti, kedudukan kader dalam kepengurusan dan kerja-kerja kepartaian yang dilakukan dibangun dengan cara gotong-royong. Tiga, hasil dari gotong-royong. Hasil dari proses kerja politik yang dilakukan dengan cara gotong-royong tidak untuk kepentingan pribadi semata, tapi untuk partai.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gaya komunikasi yang dimiliki Murdoko cenderung bergaya melepaskan *(The Reliungusing Style)*. Dimana dalam gaya komunikasi ini Murdoko lebih mencerminkan kesediaan untuk menerima saran, pendapat ataupun gagasan orang lain, daripada keinginan

untuk memberi perintah, meskipun pengirim pesan (sender) mempunyai hak untuk memberi perintah dan mengontrol orang lain.

3.1.2. H. Bambang Priyoko, SIP : Gaya Komunikasi Mengontrol

Bambang Priyoko (BP) dikenal sebagai sosok yang tegas dalam mengambil keputusan, disiplin mengenai waktu, dan berwibawa di mata orang lain. Menurut Agung[51], ketegasan sikapnya terlihat ketika pada saat reses, ada ajakan dari konstituen di luar jadwal yang telah di tentukan. Maka dengan tegas BP menolaknya dan minta untuk dijadwalkan lain waktu.

Begitu pula dengan sikap disiplinnya, saat reses BP sudah memperhitungkan dengan matang berapa jarak yang harus di tempuh, jam berapa harus sudah berangkat sehingga saat sampai di tujuan tidak terlambat. Maklumlah ia adalah Mantan Prajurit TNI AD dengan pangkat terakhir Kolonel. Walaupun dia mendapatkan cacat fisik permanen di tangan kanannya saat menjalankan tugas negara dalam pembebasan Timor-Timur, ia tidak mengalami kecanggungan dalam beraktivitas sehari-hari.

Baginya cacat fisik bukanlah sebuah halangan untuk berinteraksi dengan semua orang. Maka dari itu BP berpesan, tunjukkanlah orang yang cacat itu mempunyai kesamaan dengan orang lain yang memiliki organ tubuh lengkap. Inilah bentuk kewibawaan BP terlihat di mata konstituennya.

Pada saat pelaksanaan reses, BP terhitung aktif menjaring aspirasi di daerah pemilihannya Jawa Tengah III (Rembang, Pati, Blora, dan Grobogan). Ia

tidak melakukan kegiatan reses pada masa persidangan ke tiga (November 2010) karena yang bersangkutan tengah mengikuti ibadah haji.

Menurut Agung, bagi BP, reses itu adalah sebuah rangkaian kegiatan yang sangat baik untuk dilakukan. Beliau berpendapat, semua kegiatan yang diniatkan baik dan menyangkut kemaslahatan umat, maka *insya allah* dikerjakan akan menjadi pahala, diniatkan akan berbuah kebaikan, namun satu yang pasti dengan reses adalah mengerti kondisi rakyat yang sebenarnya. Bagaimana situasi rakyat yang diwakilinya di daerah pemilihannya, apa aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, apa keluhan mereka, sudah puaskah dengan kinerja yang dilakukan dewan selama ini sekaligus untuk mengetahui berbagai macam persoalan yang tengah berkembang di tengah masyarakat yang sedang *in* dapat diketahui saat melakukan kegiatan reses.

Menurut Suntoro[52], bagi Partai Demokrat, tidak ada sangsi secara tertulis jika ada anggota dewannya yang tidak melakukan reses. Tapi akan ada laporan yang datang dari daerah jika ada kader tidak melakukan reses. Bentuknya semacam cibiran-cibiran ataupun sindiran. Biasanya kalau orang yang bersangkutan itu memang keterlaluan maka daerah akan menghubungi ketua partai untuk mengeluh dan untuk selanjutnya Ketua partai tersebutlah yang akan menegur anggota dewan yang bersangkutan.

> *"Bertatap muka dengan warga saat reses adalah saat yang istimewa bagi anggota dewan dan konstituennya. Anggota dewan akan mempertanggungjawabkan kienerjanya dan konstituen akan menyampaikan aspirasi kepada anggota dewan tersebut. Jadi tidak ada alasan apapun bagi kader partai yang sudah mejadi anggota dewan untuk tidak turun kelapangan saat reses. Reses penting bagi semua anggota DPRD dari Partai Demolrat, karena saat nya mereka memberi kepada masyarakat atau istilah nya menanam, kita tidak boleh hanya meminta*

> *saja kepada masyarakat, tapi ada saat nya kita harus memberi. Selain itu reses ini juga bisa memperkuat komunikasi antara anggota dewan dengan konstituennya tetap terjalin, juga reses ini untuk memperkokoh tali silaturhami, agar hubungan batin tetap terjaga",* terang Suntoro.

Saat pelaksanaan kegiatan reses, BP biasanya membagikan "materi" untuk ongkos transportasi kepada konstituen sebesar @Rp. 50.000,- dikalikan jumlah orang yang datang pada saat acara reses, yaitu 300 orang. Jadi setiap kegiatan dialog dan pertemuan konstituen, BP harus mengeluarkan "materi" pribadi sebesar Rp. 15.000.000,-. Menurut Agung, besarnya "materi"yang diberikan kepada konstituen memang tidak ada dalam Rencana Anggaran Biaya yang di anggarkan dari APBD Provinsi Jawa Tengah. Pemberian itu murni atas inisiatif BP sebagai bentuk kepeduliannya kepada konstituen.

Untuk menghindari motivasi masyarakat yang menyimpang dan tidak sesuai dengan maksud diadakannya reses, maka dalam undangan untuk menghadiri kegiatan reses tidak disebutkan akan mendapatkan uang transportasi sebesar berapa rupiah. Sehingga hal ini diharapkan, masyarakat yang datang pada saat reses adalah dengan motivasi murni untuk menyampaikan aspirasinya.

Namun, keterangan berbeda dikatakan oleh Syahri yang mengatakan bahwa pemberian tersebut adalah ongkos untuk mendatangkan konstituen dalam kegiatan reses. Selian itu, motivasi kedatangan konstituen dalam acara reses kebanyakan adalah karena faktor pemberian uang ini.

> *"Jika tidak di beri uang, pasti kegiatan reses itu akan sepi dari audience. Ini adalah sebuah tradisi yang terpelihara sejak lama. Anggapan masyarakat, ketika ada kegiatan politik pasti akan dapat uang. Ada sebuah motivasi bagi mereka untuk datang dalam kegiatan reses bukan karena ingin mendengarkan materi reses, penyampaian aspirasi mereka, namun*

> *karena adanya "materi" untuk ongkos transport yang diberikan oleh panitia",* kata Syahri.

Jumlah "materi" sebesar Rp. 50.000 itu memang telah diperhitungkan sebelumnya dengan perhitungan setiap orang yang datang mengikuti kegiatan reses pasti meninggalkan pekerjaannya pada hari itu. ""materi" sebesar itu untuk pendapatan mereka hari itu karena tidak bekerja untuk mengikuti reses", tambah Syahri.

Namun selain pemberian "materi" transportasi kepada tiap-tiap konstituen, ia juga pernah secara spontanitas memberikan "materi" pribadinya kepada konstituen yang digunakan untuk bantuan sosial. Padahal setiap anggota dewan memiliki dana aspirasi yang dianggarkan melalui APBD Provinsi Jawa Tengah.

> *BP adalah pribadi yang memiliki dedikasi dan komitmen terhadap konsituten di daerah pemilihannya. Pernah dalam suatu sesi tanya jawab kegiatan reses pada hari Rabu 24 Maret 2010 di GOR Wirosari Kabupaten Grobogan, ada seorang konstituen yang mewakili kelompok taninya di Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, mengeluhkan air untuk pengairan sawahnya. Secara spontan BP langung memberikan bantuan secara pribadi sebesar Rp. 5.000.000,-.* (Suara Merdeka, 25 Maret 2010).

Sebagai Wakil Ketua Partai Demokrat Jawa Tengah, biasanya dalam kegiatan reses, BP selalu didampingi oleh struktural partai, baik yang duduk di DPR RI, ataupun DPRD Kabupaten. Maka tak mengherankan jika reses BP dilaksanakan dalam suasana formal, lengkap dengan podium dan protokoler acara. Bagi anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, memang sudah lazim memilih pelaksanaan reses dengan struktural partai atau melalui pelaksanaan mandiri yang tidak melibatkan struktural partai. Maka tak heran, konstituen yang hadir adalah struktur Partai Demokrat di tingkat kabupaten sampai desa, angggota DPRD kabupaten dan DPR RI dari Partai Demokrat.

Dilibatkannya sutruktur Partai Demokrat dalam kegiatan reses adalah karena tiga alasan. Pertama untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan reses karena tidak perlu susah-susah mencari orang sebagai koordinator lapangan dan lokasi tempat diadakannya reses. Struktur partai yang bekerja megurusnya mulai dari pengkondisian tamu atau konstituen yang datang, lokasi acara, ataupun protokoler acara. BP tinggal menyiapkan uang transportasi dan materi reses yang akan disampaikan.

Alasan yang kedua, karena BP adalah pimpinan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah sebagai wakil ketua Partai Demokrat Jawa Tengah. Sehingga selain melakukan kewajiban sebagai anggota DPRD, ia juga melakukan kewajiban sebagai pengurus partai untuk membina partai di tingkat bawah.

Selain itu, biaya total pelaksanaan reses bisa dilakukan secara bergotong royong. Intinya saling bahu membahu untuk menyukseskan kegiatan reses antara Pak BP yang ada di DPRD Provinsi dengan anggota dewan lain yang duduk di DPRD kabupaten ataupun DPR RI.

Keuntungan lainnya, dengan dilakukan secara bersama-sama maka akan ada sinergitas program antara wakil rakyat yang bersangkutan. Ini yang akan menguntungkan kader ataupun konstituen Partai Demokrat itu sendiri. Sinergitas program ini bisa dilihat dalam kasus bantuan sosial. Jika konstituen meminta bantuan sosial yang tidak bisa dipenuhi di tingkat kabupaten, prosesnya bisa di naikkan di tingkat Provinsi, atau jika provinsi tidak bisa, dapat dinaikkan di tingkat pusat. Atau masalah program pembangunan yang tidak bisa diselesaikan di tingkat kabupaten dapat dinaikkan di tingkat di atasnya.

> *"Pelaksanaan reses Pak BP dilakukan bersama struktural partai karena beliau adalah pimpinan DPD Partai Demokrat Jawa Tengah. Lagipula antar anggota DPR maupun DPRD biasanya gotong royong untuk mensukseskan kegiatan tersebut. Baik dalam jumlah "materi" ataupun barang yang diserahkan kepada konstituen. Ini sekaligus upaya untuk memeriahkan kegiatan reses",* terang Agung.

Contohnya, dalam pelaksanaan reses pada hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 dengan acara Audensi/pertemuan dengan jajaran pengurus DPC dan kader/konstituen Partai Demokrat di Gedung Pertemuan Balai Desa kedungjati Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Dalam acara itu, BP bersama anggota dewan lainnya bersama-sama membagikan *doorprize* untuk konstituennya.

> *Dalam reses kali ini, BP juga menyerahkan bantuan "materi" Rp 5 juta untuk konstituen. Selain itu ketua DPC Partai Demokrat HM Sutirto juga berkesempatan menyerahkan kenang-kenangan berupa televisi 29 inchi kepada perwakilan instansi PJKA Stasiun Kedungjati, Ngadimin yang berasal dari H Ir Djoko Udjianto dan Mayjen Ign Mulyono (anggota DPR RI dari Dapil III).* (Suara Merdeka, 25 Juli 2010).

Upaya ini dilakukan mengingat konstituen Partai Demokrat adalah masa yang cair yang tidak memiliki ikatan ideologis aliran seperti PKB dengan masa Nahdlatul Ulama, PAN dengan kaum Muhammadiyahnya, PDI Perjuangan dengan kaum abangannya, dan PKS dengan jamaah tarbiyahnya. Konstituen Partai Demokrat lebih dikarenakan adanya figur SBY yang menjadi pemersatu kader.

Pemilih Partai Demokrat itu adalah sesungguhnya bukan *voters* Partai Demokrat yang sejati, loyalis yang mengerti betul tentang platform dan visi misi Partai Demokrat sebagai partai politik. Namun mereka adalah pemilih yang merasa nyaman dengan gaya dan hasil kepemimpinan SBY sebagai presiden RI bukan SBY sebagai Ketua Pembina Partai Demokrat. Artinya, PD hanya

merupakan imbas dari kharisma figur SBY. Bahwa citra, figur dan kharisma dari seorang SBY beserta kebijakan-kebijakan SBY di pemerintahan adalah sesuatu yang berbeda dengan hasil-hasil kerja politik PD sebagai partai politik.

Selain sebagai pendiri, SBY lah yang membesarkan Partai. Partai yang didirikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono ini kini menjadi sandaran para pemilih di kalangan perkotaan. Baik itu warga kota yang tinggal di Jawa maupun luar Jawa menjadi pendukung utama partai ini. Mereka rata-rata berpendidikan menengah hingga tinggi dan bekerja sebagai pengusaha, pedagang, pegawai swasta, dan juga kalangan pegawai negeri.

Kedua, oleh karena latar belakang pemilihnya dari warga perkotaan dan terdidik, mereka ini dapat disebut sebagai pemilih kritis, yang akan memilih partai jika partai itu memang benar-benar bersih dari korupsi dan kinerjanya bagus. Jika tidak, mereka akan meninggalkannya, berpindah ke partai lain yang dipandang citranya bagus. Setiap saat dukungan bisa naik-turun berdasarkan popularitas para tokohnya. Jika merujuk naiknya citra Presiden Yudhoyono, ini sepadan dengan para pemilih PD yang juga sangat kental dengan ciri-ciri pemilih ini.

Selain itu, kemunculan partai Demokrat ibarat penampung untuk mereka yang kecewa dengan keberadaan partai-partai lain yang sudah ada sebelumnya. Terakhir, keberadaan Partai Demokrat yang banyak memiliki kader dari kalangan militer membuat partai ini seperti Partai Golkar pada zaman Orde Baru dulu. Sehingga keberadaan dan kesan militer sangat terasa ada dalam tubuh Partai Demokrat. Termasuk BP salah satunya, yang menerapkan disiplin militer dalam kesehariannya.

Dengan kharakteristik konstituen di atas, BP melakukan modifikasi reses sesuai dengan tipikal konstituennya itu. BP datang ke lokasi reses dengan pakaian sipil lengkap lengan panjang yang menambah wibawanya di mata konstituen. Namun ketika hari Rabu, BP menggunakan Baju Lurik yang merupakan pakaian khas Jawa Tengah.

> *"Ketika hari Rabu, Pak BP menggunakan pakaian lurik yang tidak saja digunakan pada saat reses tapi pada acara-acara lainnya. Dulu para pejabat Pemprov Jateng maupun pemerintahan daerah se-Jateng juga menggunakan pakaian lurik dalam aktivitas dinas mereka. Maka dari itu, sejalan dengan himbauan Gubernur Bibit Waluyo untuk menggunakan baju lurik di lingkungan Pemprov Jawa Tengah",* terang Agung.

Selain itu menurut Agung, BP menggunakan pakaian lengan panjang adalah untuk menutupi lengan kanannya yang diamputasi. Sehingga BP jarang bersalaman dengan orang menggunakan tangan palsunya itu. Kalaupun bersalaman, yang unik ia menggunakan tangan kiri atau kedua tangannya.

> *"Ia menggunakan tangan kanan palsu, hal ini yang mengakibatkan ia jarang bersalaman dengan orang menggunakan tangan palsunya itu. Kalau orang yang sudah mengenalnya itu memaklumi kekurangannya itu",* terang Agung.

Dalam penyampaian materi resesnya, BP banyak memaparkan tentang internal Partai Demokrat, situasi politik, pilkada, dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah. Walaupun ia Wakil Ketua yang membidangi Komisi B bidang perekonomian, namun ia jarang menyampaiakan dalam materi resesnya perkembangan pembangunan Jawa Tengah yang berkaitan dengan bidang perekonomian.

Contohnya, Pelaksanaan Reses pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2010 dengan acara Temu kader Partai Demokrat Kabupaten Blora di Kantor NU

Kabupaten Blora. Acara ini memang sebetulnya bukan acara reses untuk penggalian aspirasi masyarakat. Melainkan dalam reses tersebut, BP mengkampanyekan pasangan Djoko Nugroho-Abu Nafi[53] sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Blora yang maju dalam Pilkada Blora 3 Juni 2010.

> *"Kehadiran BP dalam acara tersebut memang diperlukan oleh kader, simpatisan, dan kostituen Partai Demokrat di Kabupaten Blora. Selain sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, beliau adalah sesepuh Partai Demokrat di Jawa Tengah. Maka apa yang di amanahkannya dalam pertemuan tersebut dapat memberikan motivasi dan dorongan mental bagi para kader untuk meneruskan perjuangan Partai Demokrat di Kabupaten Blora. Tentu saja dalam upaya pemenangan pasangan Djoko Nugroho-Abu Nafi",* kata Abu Nafi[54].

Selain itu, saat pelaksanaan Reses hari Selasa tanggal 20 Juli 2010 dengan acara audensi/pertemuan dengan jajaran pengurus DPC dan kader/konstituen Partai Demokrat di Gedung Pertemuan Balai Desa kedungjati Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan. Dalam acara ini, BP menyampaikan dua kemenangan pilkada di dua kabupaten (Rembang dan Blora) yang masuk Daerah Pemilihan (Dapil) III selain Kabupaten Grobogan dan Pati menjadi barometer Partai Demokrat (PD) dalam pilkada, Januari 2011 mendatang.

> *"Kemenangan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat di Rembang (H Moch Salim-Abdul Hafiz), dan Blora (Djoko Nugroho-Abu Nafi) menjadi barometer langkah partai di Pilkada Grobogan Januari mendatang. Di dua kabupaten tersebut berhasil meraih 50 persen lebih suara pemilih. Diharapkan hal itu bisa menjadi spirit dan motivasi para kader di Grobogan," tutur BPdidampingi Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Grobogan HM Sutirto.* (Suara Merdeka, 25 Juli 2010).

Dalam penyampaian materi resesnya, BP adalah orang yang kaku dalam berpidato. Pola kalimatnya jelas, ringkas, serius, dan padat. Didukung dengan intonasi bicaranya yang tinggi sebagai ciri khas militer memberi pengarahan. Mungkin karena besar dari latar militer, membuat BP amat menaati

keprotokoleran. Sepintas, sikapnya agak kaku. Senyumnya agak datar dan jarang menyaksikan BP tertawa lebar.

Menurut Agung, hal ini disebabkan karena budaya militer itu menerapkan disiplin dan etika yang tinggi maka, tertawa lebar adalah sesuatu yang dianggap tabu dan tak beretika. BP mempunyai sifat yang tegas, kukuh, dan berani mengambil keputusan dengan cepat. Ia juga teguh dalam membela prinsip yang dianggapnya benar dan harus diperjuangkan. Ketika berjalan, BP agak kaku dengan langkah yang amat tegap, seperti prajurit yang sedang menuju medan laga. Ia memang lebih banyak diam, dan memancarkan kharisma

BP berkomunikasi langsung kepada sasaran, tidak berputar-putar, tidak ber*tele-tele*, tidak menggunakan bahasa bersayap. Seringkali menggunakan bahasa tubuhnya yaitu mengacung-acungkan tangannya walaupun tidak sesering mungkin. Ketegasannya juga didukung oleh suaranya yang keras. Ia jarang menyelipkan humor saat penyampaian materi. Tapi pada saat dialog ia sering menambahnya dengan bumbu humor, walaupun itu masih dirasa kaku.

Dengan demikian, pola komunikasi yang terjadi adalah antara atasan dengan bawahan. BP selain sebagai Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, ia adalah Wakil Ketua Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah. Apa yang disampaikan dalam reses adalah arahan, petunjuk, himbauan, dan perintah kepada struktur partai di tingkat yang lebih rendah untuk melaksanakan dan mensukseskan program partai.

> *"Partai Demokrat memang unik, sebagai partai yang didirikan oleh SBY yang notabenenya adalah pensiunan militer, maka secara langsung maupun tidak langsung Partai Demokrat memiliki budaya seperti militer. Hal ini mirip Golkar di zaman Orde Baru dulu. Di lain pihak, konstituen*

Partai Demokrat juga masih menghendakai hal seperti itu", terang Suntoro.

Di lain pihak, BP adalah orang yang akomodatif dalam diajak berdiskusi di luar forum formal. Entah itu bersama struktur partai, maupun masyarakat lapisan bawah. Bila ia menemui orang yang cocok diajak bicara, BP akan suka ngobrol panjang lebar. Pada saat ini kesan simbol-simbol militer yang melekat pada dirinya akan hilang.

Suntoro mengatakan, "Beliau ketika sudah menemukan orang yang pas dan cocok dianggap bicara, ia akan *betah* berjam-jam ngobrol. Mulai dari masalah politik sampai masalah ringan sehari-hari". Semisal, ketika acara reses banyak konstituen menanyakan tentang materi yang kurang dipahami saat penyampaian tadi dan yang paling banyak adalah pertanyaan tentang proses bansos (waktu cairnya kapan dan prosesnya sudah sampai dimana).

Namun pada saat kunjungan ke lapangan yang dilakukan oleh Bambang Priyoko, walaupun ia membawahi Komisi B (bidang perekonomian) namun ia lebih banyak melakukan kunjungan untuk meninjau kerusakan infrastruktur (Komisi D) di daerah pemilihannya.

Tercatat selama kegiatan Reses tahun 2010 kemarin, BP hanya melakukan dua kunjungan peninjauan lokasi yang menjadi bidangnya. Yaitu pada saat pelaksanaan reses Hari Jumat tanggal 26 Maret 2010 dengan acara meninjau lokasi penampungan sumber air alami di Ds. Katekan Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan dan pelaksanaan reses Hari Sabtu tanggal 27 Maret 2010 dengan acara meninjau lokasi industri pengolahan kayu jati di Kecamatan Cepu Kabupaten Blora.

Menurut Agung, BP melakukan kunjungan lapangan karena lokasi yang akan ditinjau itu memang berdekatan dengan lokasi acara temu kader yang diadakan sebelumnya dan karena ada aspirasi yang datang dari masyarakat yang ingin daerahnya di bantu atau di cek pelaksanaan bantuan itu sendiri. Berdasarkan pengalaman, masyarakat sukarela ketika dikunjungi oleh P BP.

> *"Mungkin karena aspirasi yang datang dari konstituennya menginginkan perbaikan infrastruktur di daerahnya daripada masalah perekonomian. Atau karena minat BP sendiri untuk lebih menitikberatkan kepada perbaikan infrastruktur dibandingkan dengan masalah-masalah perekonomian lainnya. Padahal kalau mau di cari masalah perekonomian itu banyak sekali di Dapil III. Semisal Grobogan dengan pertanian kedelainya*[55]*, Pati dengan ubi kayu*[56] *untuk tepung tapioka dan tebu*[57]*, Rembang dengan potensi tambak dan garamnya*[58]*, dan masih banyak masalah lain bidang perekonomian lainnya",* terang Syahri.

Dalam kegiatan kunjungan kelapangan ini juga muncul aspirasi yang disampaikan oleh konstituen kepada para pimpinan dewan. Misalnya pada saat BS meninjau langsung bronjong (talut) di Desa Jumo yang tergerus air Sungai Tuntang dan kondisinya sangat mengkhawatirkan. Dia berpesan kepada Kades Jumo, Harnomo untuk segera membuat proposal pembangunan ke Pemkab Grobogan. (Suara Merdeka, 23 Maret 2010).

Namun para nara sumber mengatakan, BP dikenal sebagai orang yang tidak suka apabila ada orang menyela ketika ia bicara. Dengan cepat akan tampak dari perubahan mimik wajahnya yang menunjukkan perasaan tidak suka.

> *"BP memang tidak suka kalau ia berbicara di sela bicaranya. Kalau mau menyela adalah dengan membenarkan atau memuji apa yang dia katakan. Atau berilah stimuli dan motivasi agar menambah pembicaraan menjadi gayeng",* kata Suharyoso[59].

Lebih lanjut Agung menjelaskan, jika orang belum pernah bicara dengan BP, apalagi kalau orang itu *grusa grusu* maka ia akan merasa tidak nyaman bicara dengannya dan pada akhirnya pembicaraan akan cepat berakhir, karena BP tidak berkenan.

> *"Di manapun itu pasti tidak diperkenankan secara etika. Tapi kalau orang itu menyanggah pada saat pembicaraan biasa itu ada dua kemungkinan. Yang disanggah menerima atau tidak. Nah...beliau ini tipe orang yang tidak suka apabila disanggah/disela ketika berbicara",* kata Suntoro.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan Bambang Priyoko lebih cenderung memiliki gaya komunikasi Mengendalikan *(The controlling style).* Gaya komunikasi yang bersifat mengendalikan, ditandai dengan adanya satu kehendak atau maksud untuk membatasi, memaksa dan mengatur perilaku, pikiran dan tanggapan orang lain.

3.1.3. Dr. H. Bambang Sadono, SH, MH ; Gaya Komunikasi Dua Arah

Sebagai mantan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah dan mantan Calon Gubernur Provinsi Jawa Tengah membuat Bambang Sadono (BS) memiliki modal sosial yang cukup dalam hal pembinaan kepada konstituen. Ditambah pada periode sebelumnya BS adalah mantan Anggota DPR RI selama tiga periode (1997-2009).

Menurut Djoemali[60], acara temu kader untuk pembinaan konstituen sebenarnya adalah tradisi Golkar yang dicetuskan pada saat era kepemimpinan Harmoko (1993-1998) yang kemudian di adopsi menjadi kegiatan reses seperti sekarang ini. Awalnya termu kader adalah acara pertemuan tatap muka di antara

kader Golkar, anggota Golkar, dan simpatisan Golkar yang ingin mengetahui apa dan bagaimana peranan Golkar sesungguhnya.

Lebih lanjut Djoemali menjelaskan, temu kader adalah wahana untuk mengembangkan komunikasi dan pendidikan politik serta menyampaikan gagasan dan program-program pembangunan maupun program partai. Karena itu, dalam setiap temu kader yang dibicarakan adalah program partai dan kiprah anggota Fraksi Partai Golkar di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

Dalam melakukan kegiatan komunikasi politiknya, terutama pada saat kegiatan reses, BS sering diilhami oleh Mantan Gubernur Jawa Tengah, HM Ismail (Alm.) yang menerapkan komunikasi interpersonal berupa *Songgo* (*tongkrong*), *jagong* (mendatangi orang punya hajat), dan *layat* (bertakziah).

Tongkrong adalah budaya masyarakat jawa atau mungkin Indonesia pada umumnya yang dimana masyarakat dalam satu komunitas tertentu, biasanya di kampung-kampung, di kedai makan, pos siskamling, ataupun di tempat dimana antar anggota masyarakat itu berkumpul untuk membicarakan hal-hal yang ringan. Tujuannya adalah terciptanya saling akrab antar anggota komunitas yang bersangkutan, entah itu warga kampung atau komunitas lainnya.

Sebagai mahluk sosial, pasti akan mengalami kegiatan yang bersifat manusiawi seperti melahirkan, khitanan, ataupun pernikahan. Hal ini wajar di alami oleh seluruh masyarakat. dan kebiasaan orang kita, kalau pas acara itu pastialah mengundah sanak kerabat, handai taulan untuk datang sekedar untuk mengharap doa restu atas acara yang sedang diadakan oleh si empunya rumah sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkah ataupun

kenikmatan yang diberikan kepada keluarganya itu. Maka dari itu, saat acara itu biasanya saling berkumpul masyarakat dari seluruh lapisan, dan BS bisa lebih mendekatkan diri kepada masyarakat tersebut.

Yang terakhir, setiap manusia hidup pastilah akan mengalami kematian, dan yang jelas, saat acara penguburan mayat pastilah sanak kerabat dan tetangga tak kecuali kenalan pada datang untuk berbelasungkawa. Tapi menurut Djoemali, *layat* dalam hal ini tidak saja melayat kepada orang yang sudah meninggal saja. Tapi kepada mereka yang terkena musibah semisal bencana alam, wabah penyakit, dan lain sebagainya.

Merujuk hal di atas, *tongkrong* dapat diartikan mengadakan kegiatan reses bukan di adakan di Hotel ataupun kantor partai melainkan di adakan di rumah penduduk. Walaupun rumah tersebut adalah berfungsi sebagai sekretariat Partai Golkar tingkat kecamatan, pondok pesantren dan sekolah.

> *"Sekarang sudah bukan zamannya lagi mas anggota dewan menjadi raja untuk dilayani oleh masyarakat, tapi sebaliknya anggota dewan haruslah melayani masyarakat. dan bukan zamannya lagi, kita mengundang masyarakat di kota, emang masyarakat mau. Dalam pikiran masyarakat sekarang, yang butuh siapa ? maka dari itu, anggota dewan haruslah mendatangi basis-basis massa yang ada di tengah masyarakat*", terang Djoemali.

Alasan dipilihnya tempat tersebut menurut Maryudi[61], adalah karena merupakan sarana yang paling efektif untuk lebih mendekatkan diri kepada rakyat langsung yang menjadi konstituen. Ditambah konstituen BS bukan saja dari kalangan internal Partai Golkar.

> *"Reses adalah sarana yang paling efektif untuk lebih mendekatkan diri kepada rakyat langsung yang menjadi konstituen. Ibaratnya kita menemui basis masa langsung mas, bukan menemui simpul-simpul massa. Ditambah konstituen BS bukan saja dari kalangan internal Partai Golkar.*

> *Alasan yang kedua adalah karena P BS sekarang kan sudah tidak menjabat sebagai Ketua partai lagi, jadi ini yang menjadi alasan beliau untuk tidak mengadakan kegiatan reses di kantor partai. Kecuali kalau beliau diundang oleh ketua partai di daerah untuk kegiatan partai lain. Pastilah beliau akan selalu hadir. Ditambah kalau diadakan di sekretariat partai dananya cukup besar mas. Kan kalau di Golkar terkenal dengan mesin politiknya perlu di beri oli atau bensin dulu biar bisa jalan ?Yang ketiga dari segi biaya mas. Kalau dilaksanakan di rumah-rumah penduduk ataupun sekolahan dan pondok pesantren kan lebih ringan. Mengingat pada periode ini tidak ada bantuan yang diberikan pemprov untuk anggaran pelaksanaan reses yang untuk diberikan kepada orang per orang*, Ungkap Djoemali.

Namun keterangan berbeda dikemukakan oleh Syahri. Menurutnya pelaksanaan reses BS dilaksanakan di pondok pesantren, sekolahan, dan rumah warga yang berfungsi sebagai sekretariat partai adalah dikarenakan untuk penghematan biaya. *"Sebagai sebuah Partai Politik, Partai Golkar kan sama dengan partai politik lainnya. Dimana setiap kegiatan politik memerlukan "gizi" yang cukup bagi para konstituen dan kadernya",* terang Syahri.

"Gizi" yang dimaksud adalah jumlah materi yang harus di berikan anggota DPR/DPRD kepada setiap konstituen per orangnya pada saat kegiatan politik berlangsung, baik itu temu kader, konsolidasi, pelatihan pengkaderan, ataupun kegiatan reses itu sendiri.

> *"Bayangkan apabila pada setiap kegiatan reses, jika yang datang sekitar 300 orang dan masing-masing yang datang diberi "materi"Rp. 25.000,- s/d Rp. 50.000,-/orang. Jadi setiap kegiatan harus menyediakan sekitar Rp.7.500.000-Rp.15.000.000,- dimana anggaran tersebut tidak ada dalam anggaran reses",* Syahri menambahkan.

Pada saat kegiatan reses, BS memang tidak memberikan "materi" kepada konstituen per orang yang digunakan sebagai ganti biaya transportasi untuk datang ke tempat acara. Uang tersebut sesuai dengan aturan yang ada di gantikan dengan

konsumsi berupa makanan dan *snack* bagi peserta reses. Untuk menghindari penyimpangan anggaran, maka BS tidak memberikan uang.

> *"Kalau periode 2004-2009 peserta yang datang mengikuti kegiatan reses di beri "materi" sebesar Rp. 75.000,- per orang. Namun pada saat periode 2009-2014, pemberian "materi" itu tidak ada dan di gantikan dengan jatah "materi" untuk konsumsi",* terang Maryudi.

Biasanya menjelang kegiatan reses, BS menyerahkan sejumlah "materi" untuk konsumsi bagi panitia/tuan rumah kegiatan reses sesuai dengan ketentuan yang ada, yakni sebesar Rp. 37.000,- per peserta. Dengan jumlah peserta maksimal 300 orang untuk sekali masa reses. Dari panitia/tuan rumah inilah kemudian yang mengelola uang tersebut untuk kemudian dibelanjakan konsumsi bagi peserta reses.

Reses yang diadakan BS sering diadakan bersama dengan anggota dewan lainnya, baik itu yang berasal dari DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten. Salah satu keuntungan reses diadakan bersama adalah masalah penghematan biaya pelaksanaan reses. *"Bayangkan ketika setiap pertemuan reses yang dihadiri oleh 100 orang, dengan asumsi uang snack dan makanan adalah per orang nya sekitar 20 ribu maka uang sebanyak 2 juta tersebut kalo dibebankan kepada dua orang itu kan ringan"*, kata Djoemali.

Namun, para nara sumber mengatakan, tidak semua kegiatan reses dilaksanakan bersama-sama. Mereka beranggapan dalam sebuah partai politik pastilah memiliki konstituen. Tak terkecuali partai Golkar dimana individu-individu yang menjadi anggota dewan tersebut pastilah juga memiliki konstituen masing-masing. Maka tugas untuk merawat dan menjaga konstituen adalah menjadi tanggungjawab masing-masing anggota dewan yang bersangkutan.

Apalagi di era pemilu seperti sekarang ini, dimana ketokohan seorang individu lebih penting daripada institusi partai politik. Di dalam pemilu 2009 kemarin adalah memilih calon bukan memilih partai politik. Sedangkan Reses salah satu tujuannya adalah untuk merawat konstituen maka dari itu, pola merawat itu ada individu-individu masing-masing anggota dewan. Tidak mungkin pada saat pemilihan si A yang menjadi konstituen memilih dua orang calon anggota legislatif. Hal ini berbeda ketika reses yang mengadakan adalah institusi partai tingkat kabupaten.

Dalam acara dialog pada saat reses BS, tidak ada podium ataupun protokoler resmi acara dan kursi tempat duduk. Yang ada hanya karpet dan tikar sebagai alas bagi BS dan konstituen yang menjadi peserta kegiatan reses.

> *"Malah pada saat pelaksanaan reses yang dilaksanakan di rumah saya, Mix yang di gunakan untuk sound system pun tak ada. Untunglah Pak BS nada bicaranya agak keras, sehingga konstituen mendengarkan apa yang dia bicarakan",* kata Mustofa[62].

Para narasumber mengatakan, ketika memasuki tempat acara reses, BS selalu menyempatkan diri untuk bersalaman kepada konstituennya. Mulai dari menanyakan kabar, keadaan, sampai bagi yang sudah dikenalnya ia menanyakan sekarang sibuk apa. Dan ia juga tak segan-segan untuk menanyakan no telepon tokoh masyarakat yang ditemuinya.

> *"Mungkin jumlah phone book di hand phone nya lebih dari 5.000. ia rajin menyimpan no telp. orang. Mulai dari pejabat sampai orang biasa. Kata Pak BS, menyimpan no telp orang adalah langkah pertama dari merawat konstituen",* terang Maryudi.

Saat pemaparan reses, BS menerangkan materi reses yang berisi : (1) Hasil Reses masa Persidangan sebelumnya, (2) Masalah Aktual pada saat pelaksanaan

reses tersebut yang terjadi di lingkup nasional, regional Jawa Tengah, maupun lokal daerah, sampai pilkada yang akan/telah dilaksanakan di daerah yang bersangkutan, (3) Kegiatan Fraksi Partai Golkar dan DPD I Partai Golkar Prov. Jawa Tengah. Materi reses tersebut di bagikan kepada seluruh konstituen yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan reses. Kadang BS menambahkan materi lain diluar materi reses yang telah dibagikan itu.

Walaupun pelaksanaan kegiatan reses di rumah penduduk ataupun pondok pesantren, kadangkala BS menyampaikan materinya dengan bantuan layar proyektor (LCD). Ini dimaksudkan agar penyampaian materinya bisa dimengerti oleh konstituennya yang datang.

> *''Walaupun materi reses sudah dibagikan kepada setiap konstituen, namun Pak BS saat menerangkan juga di bantu oleh LCD. Mungkin ini kelihatan wah bagi masyarakat desa, tapi dengan demikian materi yang disampaikan bisa lebih mengena di pikiran konstituen",* kata Mustofa.

Semisal, ketika kegiatan reses di Desa Kalimaro dan Jumo, Kecamatan Kedungjati, Kabupaten Grobogan pada hari Senin 22 Maret 2010, BS menjelaskan kepada tamu undangan, di antaranya kepala desa, perwakilan Muspika, tokoh masyarakat, dan warga setempat, bahwa pengajuan proposal bantuan bisa melalui dua cara.

> *Pertama dan yang paling efektif adalah melalui jalur dari bawah (desa), kemudian diurutkan ke kecamatan, kabupaten, hingga ke provinsi. Cara lain, melalui program aspirasi. Yakni, kelompok masyarakat atas nama desa mengajukan proposal yang dititipkan melalui wakil mereka di DPRD. ''Saya sarankan menempuh jalur yang pertama dulu. Bukannya saya enggan repot, namun dalam pelaksanaan akan lebih tertata dan mudah pengawasannya bila berkesinambungan dari hulu ke hilir melalui pemerintahan setempat,'' kata BS yang membidangi masalah kesejahteraan rakyat (Kesra) di DPRD Jateng, Senin (22/3).* (Suara Merdeka, 23 Maret 2010).

BS menerangkan materi reses dengan bahasa yang mudah di mengerti oleh konstituennya di tempat yang diadakan reses itu. Ketika reses banyak diikuti oleh kader partai, BS menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya. Ketika *audience* nya masyarakat pedesaan/di luar partai, ia menggunakan bahasa Jawa halus sebagai pengantarnya. Ia menyampaikan materi reses langsung kepada inti permasalahannya, tidak menggunakan bahasa bersayap, lugas, dan tegas.

> *"BS itu orang yang pandai menempatkan dirinya di tengah-tengah orang lain yang di ajak bicara. Kapan ia harus bicara bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa Jawa. Ia mampu berbahasa Jawa halus ataupun ngoko. Maklum lah, Pak BS kan juga ketua Dewan Kesenian Jawa Tengah (DKJT) sekarang",* terang Mustofa.

Hal yang hampir senada di ungkapkan oleh Anwar Kholil, "Konstituen Partai Golkar kan kebanyakan *Priyayi Sepuh* maka untuk menghormati mereka, Pak BS menggunakan bahasa Jawa halus. Beda juga saat pelaksanaan reses di sekolahan ataupun pondok pesantren, audiencenya adalah santri dan murid yang menjadi peserta didik, maka ia menggunakan bahasa Indonesia", katanya.

Senada dengan itu, Djoemali mengatakan bahwa partai Golkar adalah partainya priyayi. Priyayi sebagai kelompok sosial adalah golongan elit, yaitu siapa saja yang berdiri di atas rakyat jelata, yang dalam beberapa hal memimpin, memberi pengaruh, mengatur dan menuntun masyarakat. Administratur, pegawai pemerintah dan orang-orang yang berpendidikan dan berkedudukan lebih baik adalah juga priyayi. Golongan priyayi sebagai kelompok sosial memiliki ciri-ciri tertentu yang dengan jelas menunjukkan perbedaannya dengan kelompok sosial lainnya, terutama kelompok sosial dari masyarakat kebanyakan. Ciri-ciri yang membedakan itu seperti bahasa dan adat sopan santun, bentuk rumah kediaman,

pakaian, gelar pada nama dan sebagainya. Dari bentuk rumah (dan keluarga besarnya serta pembantupembantunya/abdi), pakaian dan gelar serta namanya sepintas lalu dapat diidentifikasi kepriyayian seseorang.

Dengan demikian, dalam komunikasi politik kader Golkar harus memperhatikan tipologi priyayi tersebut. Artinya gaya bahasa, ataupun bentuk komunikasi yang dilakukan harus sesuai dengan budaya priyayi, yaitu santun, lemah lembut, *nguwongke uwong* (memanusiakan manusia). Tak jarang dalam pemaparannya, BS menyampaikan data-data pembangunan di Jawa Tengah tanpa menggunakan teks (contekan) sebagai bantuan untuk mengingatnya.

> *"Pak BS itu orang yang perfektsionis, semua hal mulai yang ringan sampai yang berat di pikirkannya secara matang. Ia tidak mau walaupun kegiatan reses yang dihadiri masyarakat desa hanya berjalan sebagai formalitas. Pak BS menyiapkan segala sesuatunya secara teliti. Semisal, sebelum pelaksanaan reses, ia mempelajari data-data yang menunjang seperti angka-angka pembangunan yang ada di Jawa Tengah*", terang Maryudi.

Para narasumber mengatakan, bahasa tubuh yang digunakan BS hanya gerakan tangan yang tidak terlalu *over*. Namun ketika, ada pertanyaan yang menyinggung dirinya, sangat kelihatan dari perubahan mimik wajahnya yang menunjukkan perasaan tidak suka. Walaupun *perfectsionis* kadang Pak BS datang ke tempat acara pernah terlambat. Untuk itu, ia selalu minta maaf kepada konstituen atas keterlamabatannya. Tapi tak jarang pula ia harus menunggu lebih dari satu jam agar konstituen datang memenuhi tempat acara.

> *"Mungkin ini disebabkan karena tidak ada "materi" sebagai ganti ongkos transport yang diberikan kepada konstituen sehingga mereka yang datang hanya dengan motivasi ingin menyampaikan aspirasi mereka, tidak berlandaskan "materi",* terang Syahri.

Pada saat pelaksanaan reses, tak jarang BS melaksanakannya bersama anggota DPR RI, DPRD Jawa Tengah lainnya, dan DPRD Kabupaten di dapil tersebut. Contohnya : Pelaksanaan reses masa persidangan ke II hari Rabu, 21 Juli 2010 di Ponpes Miftahul Amal Ds. Jiworejo Kecamatan Jiken Kabupaten Blora yang juga di hadiri oleh Suningsih yang merupakan Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golkar.

Juga Pelaksanaan kegiatan reses di Rembang hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 dengan acara menyerap aspirasi masyarakat di Ponpes ”Zomrotul Tholibin” Sulang Rembang yang di hadiri Sesepuh, Tokoh Masyarakat, PD Golkar, Perangkat Desa, Santri Putra dan Santri Putri, M. Anwar Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Fraksi Golkar, Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah lainnya yang berasal dari Partai Golkar dan terpilih dari dapil tersebut (H.A Djoemali,S.Sos).

Untuk kegiatan reses ini, selain memaparkan materi di atas, BS juga mengkampanyekan H.A Djoemali, S.Sos yang maju sebagai Wakil Bupati Rembang yang di usung oleh Partai Golkar[63]. Hal ini wajar, mengingat BS adalah kader Partai Golkar yang harus mengimplementasikan amanat Catur Sukses yang telah dicanangkan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ir. Aburizal Bakrie, yakni sukses konsolidasi dan modernasasi organisasi, sukses pengaderan dan menyejahterakan rakyat, serta sukses memenangi pilkada, pemilu legislatif dan Pilpres 2014.

> *"Ini merupakan instruksi yang menyentuh kami sebagai kader agar segera merapat ke rakyat untuk mendengarkan aspirasi mereka. Kami siap mengimplementasikannya, karena, suara rakyat adalah suara Partai Golkar,"* kata Djoemali.

Tak jarang dalam penyampaian paparannya, BS menyampaiakan data-data yang menunjang. Perbendaharaan pengetahuan dan data yang dia miliki cukup luas. Setelah duduk sebagai Koordinator Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi Kesejahteraan Masyarakat, BS lebih banyak menyoroti bidang yang diampunya itu, seperti Pendidikan, pariwisata, keagamaan.

Dalam kegiatan reses biasanya terjadi dialog antara BS dengan konstituen baik masalah yang dibahas saat ataupun masalah diluar konteks pembahasan. Selain itu, BS menghargai pertanyaan orang ketika berdialog, ia menerangkan jawaban panjang lebar agar konstituen maupun si penannya paham atas penjelasan dan permasalahan yang ditanyakannya itu. Contohnya, pada saat pelaksanaan reses di aula Pondok Pesantren Miftahul Amal Ds. Jiworejo Kecamatan Jiken Kabupaten Blora tanggal 20 Juli 2010, BS menyatakan pentingnya pendidikan karakter bagi generasi bangsa.

> *"Pendidikan karakter ini sangat penting bagi generasi penerus bangsa. Departemen Agama saat ini mencanangkan kembali pendidikan karakter, sehingga peran madrasah dan pesantren memiliki posisi yang sangat penting dan strategis. Adik-adik yang belajar di lembaga pendidikan berbasis agama, tidak sekadar cerdas secara kognitif saja, karena pendidikan agama ini menjadi salah satu modal pembentukan karakter. Saya berharap Blora atau Ponpes Miftahul Amal ini bisa lebih maju dan berkualitas seperti Gontor"*. (Suara Merdeka, 21 Juli 2010).

Dalam Reses tersebut, dihadiri oleh pengasuh Pondok Miftahul Amal, KH Drs Dawam Nawawi, kepala Desa Jiworejo Ismanto, para santri dan masyarakat sekitar. BS ketika menjawab pertannyaan dari Mohammad Rofiq, salah seorang santri bertanya, sejauh mana ia sebagai anggota dewan, memperjuangkan madrasah dan lembaga pendidikan berbasis agama ?

> *"Kami akan memperjuangkan ini dengan kawan-kawan di DPRD Jateng terutama di Komisi E. Pendidikan berbasis agama ini sangat penting, karena di dalamnya diajarkan nilai-nilai dan kesantunan agar santri atau siswa menjadi generasi yang cerdas dan berkarakter," tandas Bambang Sadono".* (Suara Merdeka, 21 Juli 2010)**.**

Contoh lainnya, ketika pelaksanaan reses di Desa Kalimaro dan Jumo, Kecamatan Kedungjati pada Hari Senin 22 Maret 2010. BS menerangkan panjang lebar mengenai etika pelaksanaan reses kepada konstituennya. Disampaikannya, merupakan kewajiban moral bagi anggota dewan untuk turun ke bawah menyerap aspirasi dari masyarakat. Namun, akan lebih efektif bila anggota DPRD tersebut didampingi satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dari pemkab setempat. Rencana pendampingan ini sedang dalam usulan para wakil rakyat yang akan dibahas dalam waktu dekat.

> *''Tujuannya, bila ada pertanyaan dari masyarakat terkait teknis bisa langsung terjawab. Kalau di Grobogan saya lihat niat dan program bupatinya sudah baik dan sarat untuk memajukan wilayahnya, namun sayang banyak pelaksana proyeknya yang bermasalah. Bidang kesehatan juga ada peningkatan dengan program Jamkesmas dan Jamkesmasda, namun semua kembali ke masalah dana yang sedang kita cari solusinya bersama-sama,'' tambahnya yang akan melanjutkan kunjungan resesnya ke Blora itu".* (Suara Merdeka, 23 Maret 2010).

BS adalah tipe orang yang runtut ketika menjelaskan permasalahan. Mulai permasalahan yang sifatnya umum sampai yang mengarah ke khusus. Pembahasannya juga fokus dan tidak ngelantur. Anwar Kholil[64]. mengatakan, *"Mungkin karena dia seorang Doktor dan juga wartawan, jadi apa yang dia sampaikan runtut sehingga orang yang mendengarkan apa yang ia sampaikan menjadi paham maksud pembicaraan itu".*

Penampilannya di saat reses pun cukup sederhana, dengan menggunakan baju batik dan sepatu sandal agar lebih praktis tidak perlu susah copot sepatu jika

duduk beralaskan tikar. Kadangkala dalam penyampaian materi, ia menyelipkan humor untuk mencairkan suasana.

Namun, pada saat acara kunjungan ke lapangan, ada sedikit geger budaya yang dialami BS. Ia yang memiliki latar belakang dirinya yang bukan santri tapi harus mengunjungi komunitas santri. Contohnya, pada pelaksanaan reses Bambang Sadono hari Rabu 24 Maret 2010 dengan acara Menyerap aspirasi masyarakat di Ponpes ”Zomrotul Tholibin” Sulang Rembang di hadiri Sesepuh, Tokoh Masyarakat, PD Golkar, Perangkat Desa, Santri Putra dan Santri Putri, Anggota DPRD Kabupaten Rembang dari Fraksi Golkar. Menurut Nanang[65], BS memang rajin mengunjungi pondok pesantren pada saat dulu mencalonkan diri menjadi Calon Gubernur Jawa Tengah dan kebiasaan tersebut tetap diteruskan sampai sekarang.

> *“Mungkin karena pada saat reses acaranya itu bermacam-macam dan tidak hanya di Pondok Pesantren saja maka Pak BS tidak menggunakan busana muslim. Ini bukan karena sebab ia tidak menghormati pondok pesantren dan kyainya, tapi karena dikarenakan situasi yang mendesak saja”,* terang Nanang.

Namun keterangan berbeda disampaikan oleh Imam Supardi[66], menurutnya, BS adalah seorang Nasionalis. Ia dibesarkan dalam budaya abangan dan kejawen. Ayahnya dulu adalah tokoh Partai Nasional Indonesia (PNI) di Kabupaten Blora. “Kultur abangan itu masih di bawanya sampai kini walaupun ia tetap memegang teguh syariat Islam”, tambah Imam Supardi.

Semua staf pribadi Pimpinan dewan menjelaskan, jika melakukan silaturahmi ataupun kunjungan ke pondok pesantren, secara etika harus ada *bisyaroh* atau “materi” yang diserahkan kepada pimpinan pondok pesantren.

Besarnya bervariasi antara Rp. 500.000,- sampai dengan Rp.5.000.000,- untuk sekali acara silaturahmi atau kunjungan ke pondok pesantren.

Di akhir acara reses, untuk mencairkan suasana, BS sering menggunakan pantun bahasa Jawa (parikan), seperti :

Santen peresan klopo

(Santan diperas dari kelapa)

Cekap semanten atur kulo

(Cukup sekian penyampaian saya)

Mangan Kupat dicampur santen

(Makan ketupat dicampur santan)

Menawi lepat, Kulo Nyuwun pangapunten

(Kalau ada kesalahan, Saya mohon dimaafkan)

Lemah-lemah iku teles

(tanah-tanah itu basah)

Namung Gusti Allah ingkang saget mbales

(Hanya Allah yang bisa membalas)

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bambang Sadono cenderung memiliki Gaya Komunikasi Dua Arah *(The equalitarian style).* Dalam gaya komunikasi ini, aspek penting ialah adanya landasan kesamaan. *The equalitarian style of communication* ini ditandai dengan berlakunya arus penyebaran pesan-

pesan verbal secara lisan maupun tertulis yang bersifat dua arah *(two-way traffic of communication)*.

Dalam gaya komunikasi ini, tindakan komunikasi dilakukan secara terbuka. Artinya, setiap anggota organisasi dapat mengungkapkan gagasan ataupun pendapat dalam suasana yang rileks, santai dan informal. Dalam suasana yang demikian, memungkinkan setiap anggota organisasi mencapai kesepakatan dan pengertian bersama.

3.1.4. Drs. Fikri Faqih. MM : Gaya Komunikasi Dua Arah

Sebagai seorang ulama dan sekaligus Ketua DPW PKS Jawa Tengah, Fikri memiliki gaya komunikasi tersendiri. Ketika memaparkan materi reses, ia tidak menggebu-gebu. Tutur bahasanya santun dan halus dan terkesan datar dalam penyampaian intonasinya.

> *"Fikri menyadari dirinya akan hal itu, maka ia menghindari menyampaikan materi reses dengan nada keras. Namun ia tahan menerangkan sebuah permasalahan ataupun materi reses dengan waktu yang lama dan tidak mengulang inti kalimat yang sama. Itu kelebihannya",* terang Syahri

Seperti layaknya kader PKS lainnya, sebelum memaparkan materi reses, Fikri mengkumandangkan takbir. Biasanya Takbir itu dikumandangkan pada saat acara reses yang konstituennya mayoritas adalah massa PKS. Takbir bagi kader PKS adalah semacam penyemangat untuk melakukan tindakan kebenaran. Suatu ajakan bahwa segala tindakan kita akan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah SWT. Dengan takbir kita juga dituntun bahwa semua usaha manusia tidak ada apa-apanya tanpa adanya persetujuan dari sang maha kuasa, yaitu Allah SWT.

*"Takbir itu adalah motivasi untuk membangkitkan semangat konstituen. Inilah ciri khas PKS. Fakta di lapangan, kader PKS tak bisa dipisahkan dari idiom-idiom ke-Islaman. Meski harus ditegaskan, pekikan takbir sama sekali tidak memiliki korelasi dengan penghormatan terhadap penyambutan tamu. Sesungguhnya makna takbir begitu dalam. Kalimat "Allahu Akbar" mampu mengobarkan semangat. Dalam kesendirianpun, takbir itu bisa menjadi penggugah hati yang "mati suri" oleh sebab keangkuhan",*kata Anton[67].

Namun lebih lanjut Anton menjelaskan, tidak semua acara yang dilakukan oleh Pak Fikri harus mengkumandangkan takbir. Takbir hanya dikumandangkan jika yang hadir itu adalah konstituen murni PKS. Tapi kalau pelaksanaan reses di desa-desa dimana hanya dihadiri oleh masyarakat umum tidak ada acara mengumandangkan takbir. Pada intinya adalah situasional saja.

"Coba misalkan kalau reses di desa-desa itu yang hadir bukan seluruhnya kader PKS tapi malah masyarakat biasa misalnya, kan tidak bagus untuk PKS sendiri. Kesannya terlalu memaksakan kehendak, dan malah mereka takut pada kita," terang Anton.

Para peserta yang mengikuti kegiatan reses tidak ada yang di beri "materi" oleh Fikri sebagai ganti transportasi. Namun ketika berkunjung untuk silaturahmi di pondok pesantren ataupun masjid/mushola, Fikri pasti memberikan bantuan pendanaan diluar bantuan sosial dari APBD Jawa Tengah.

Suhariyanto[68] menjelaskan, memang Pak Fikri tidak pernah memberikan "materi" untuk ongkos transportasi kepada konstituen saat reses. Selain tidak diatur/dianggarkan dalam peraturan, pemberian "materi" itu takutnya bisa dikategorikan sebagai bentuk gratifikasi.

"Ibarat orang nandur mesti ngunduh. Kalau ibarat pepatah itu, artinya Pak Fikri mendidik konstituennya untuk senantiasa menerapkan sopan santun dalam berpolitik. Kalau sudah tidak ada alokasi anggaran untuk uang transport, tapi masih dipaksakan, pastikan seorang anggota dewan akan melakukan segala hal dalam upayanya untuk memenuhi kebutuhan

konstituennya itu, ujung-ujungnya adalah korupsi. Nah di sini kemudian yang diajarkan Pak Fikri, apa konstituen itu mau mempunyai seorang wakil yang kemudian dikenal sebagai koruptor ?
Menurut Pak Fikri, untuk merawat kader kan tidak hanya dalam memberikan jatah uang transportasi pada saat reses, kalau kader sampai berpikiran hanya seperti itu, ya sungguh kerdil sekali pemikirannya.
Seharusnya kader berpikir yang lebih bear untuk itu. Semisal melalui kegiatan bantuan sosial kemasyarakatan, entah itu bentuknya bantuan sarana ibadah, sarana pendidikan, perbaikan jalan, atau yang lainnya. Itu kan malah lebih bisa dirasakan manfaatnya bagi hajat hidup orang banyak", terang Suharyanto.

Dilain pihak, konstituen PKS yang menjadi basis masa Fikri adalah kader militan yang lebih mengedapankan idealisme. Kader dan simpatisan adalah dari kaum terdidik, perekonomian menengah stabil dan tinggal di perkotaan. Hanya sebagian kecil yang tinggal di pedesaan. Asas dan ideologi PKS yang tercantum dalam AD/ART Partai adalah partai da'wah Islam, bisa dikategorikan sebagai partai religi yang ada di Percaturan politik nasional, Indonesia.

Ketika menghadiri acara reses, Fikri senantiasa bersalaman dengan konstituennya pada saat memasuki ruangan tempat dilaksanakan reses. Walaupun itu hanya dilakukannya kepada konstituen laki-laki saja. Karena sesuai dengan aturan yang ada di PKS, diharamkan bagi laki-laki bersalaman dengan wanita yang tidak halal baginya.

"PKS berpendapat haram hukumnya bersentuhan tangan seperti salaman antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram. Istilah mahram ini sering dilafalkan muhrim oleh orang-orang Indonesia, pengertiannya adalah kriteria-kriteria lelaki atau perempuan mana saja yang haram untuk dinikahi, seperti perempuan atau lelaki yang ada hubungan darah dengan kita, semacam ayah dan ibu kandung, adik dan kakak, nenek dan kakek, paman dan bibi. Dengan demikian istilah bukan mahram atau bukan muhrim diperuntukkan sebaliknya, yaitu kriteria-kriteria lelaki atau perempuan yang halal untuk dinikahi", terang Ustad Rahmat Raharjo[69].

Tidak hanya dalam hal bersalaman yang tidak diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan. Ketika berlangsung acara reses Fikri terdapat batas pemisah[70] antara konstituen laki-laki dan perempuan. Biasanya untuk konstituen laki-laki berada di sebalah kanan dan perempuan berada di sebelah kiri.

Saat reses, Fikri memakai pakaian sipil lengkap berlengan panjang. Kadangkala Fikri memakai baju batik lengan panjang. Satu hal yang membedakan dengan wakil pimpinan DPRD yang lain ialah ia selalu menggunakan peci kemanapun ia pergi.

> *"Ini mungkin sebuah tuntutan psikologis dari Kader dan konstituen PKS yang terkenal dengan partai yang berlandaskan Islam. Di sisi lain, Pak Fikri kan ulama. Jadi sangat wajar jika ia menggunakan peci, kan tidak lucu kalau seorang ulama pakainnya tidak mencerminkan budaya yang Islam",* terang Rahmat.

Karena kegiatan reses diadakan bersama dengan instansi pemerintah tingkat kabupaten/kota, dan struktural partai, maka kegiatan reses di laksanakan dalam situasi formal. Memang kadangkala tidak ada podium untuk menyampaikan materi, namun ada meja yang di tempati oleh pembicara dan protokoler acara. Namun walaupun dilaksanakan secara formal, acara kegiatan reses tidak berjalan sangat kaku. Dialog antara Fikri dan konstituennya tetap berlangsung dan pada saat dialog ini kadangkala malah melebihi waktu yang sudah ditentukan sebelumnya.

> *"Karena sering mengikuti kehendak masyarakat inilah, menejemen waktu Fikri kadangkala tidak tepat waktu, banyak molornya. Beliau senantiasa enggan menolak permintaan masyarakat untuk berdialog lebih lama, Pak Fikri memang orang gampangan diajak dialog. Ia terbuka dengan siapa saja termasuk orang yang baru dikenalnya. Menurutnya, tugas wakil rakyat sejatinya ialah melayani bukan malah dilayani",* kata Suharyanto.

Fikri dikenal sebagai orang yang tekun dalam belajar termasuk semua materi pekerjaannya di DPRD Jawa Tengah. Maka tak heran ketika ia sering mengutip angka-angka pembangunan di Jawa Tengah untuk menunjang materi reses yang disampaikan. Fikri juga menguasai referensi peraturan perundangan yang ada.

> *"Ia hafal betul data dan angka pembangunan Jawa Tengah dan tidak pernah membawa teks contekan ketika menyampaikan materi reses. Saya pernah mencatat apa yang disampaikannya saat reses, ketika saya cocokkan ternyata benar angka-angka itu",* kata Syahri.

Namun pada saat acara dialog, ketika ada pertanyaan dari *audience* yang Fikri tidak/belum mengerti jawabannya atau solusi dari permasalahan itu bukan di tangannya, ia dengan jujur mengatakannya. Contohnya pada saat pelaksanaan reses Hari Rabu tanggal 21 Juli 2010 dengan acara pertemuan dengan Pejabat Pemerintah Kota Tegal yang diterima oleh Walikota Tegal, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan beberapa Anggota DPRD Kota Tegal, dan dilanjutkan dengan pertemuan dengan Kader PKS, tokoh Agama, para Pemuda, Tokoh Masyarakat Kota Tegal. Dalam sesi dialog muncul pertanyaan dari warga yang mengeluhkan mahalnya biaya pendidikan yang memberatkan warga miskin.

Menurut Kusnendar, warga Kelurahan Randugunting, sebenarnya untuk meringankan beban biaya pendidikan, khususnya bagi warga tak mampu, pemerintah pusat telah menyalurkan Bantuan Opersasional Sekolah (BOS). Bahkan Pemkot Tegal, melalui APBD juga telah mengalokasikan anggaran untuk membebaskan biaya pendidikan.

Namun kenyataanya, biaya pendidikan saat ini sangat mahal. Karena dibebaskan dari SPP, akhirnya sekolah menarik iuran komite, uang untuk beli

Lembar Kerja Siswa (LKS), serta untuk membeli buku-buku. Bagi warga yang mampu mungkin hal ini tak memberatkan, tapi warga tak mampu sangat memberatkan

> *"Kami minta komitmen anggota DPRD, baik yang berasal dari DPRD Provinsi Jateng maupun DPRD Kota Tegal untuk menyuarakan keluhan masyarakat ini. Agar warga miskin juga bisa menikmati pendidikan, bukan untuk warga yang mampu saja," kata Kusnendar.*
> *Hal senada diungkapkan Dewi warga Margadana, dalam reses Wakil Ketua DPRD Provinsi Jateng Abdul Fikri Faqih, meminta, agar pemerintah tidak membedakan sekolah negeri dan swasta. Sehingga siswa yang sekolah di swasta juga diperhatikan, agar biaya pendidikannya tak mahal.*
> *"Agar tidak ada kejemburuan, maka pemerintah jangan membedakan sekolah negeri dan swasta. Kalau negeri biayanya dibebaskan, maka swasta juga harus dibebaskan," pintanya.* (Radar Tegal, 22 Juli 2010).

Menanggapi pertanyaan ini, Abdul Fikri Faqih, menyatakan, karena ini adalah masalah Kota Tegal. Maka keluhan ini akan disampaikan pada Pemkot Tegal, melalui forum reses bersama. "Kami tidak akan menjawab pertanyaan ini, tapi akan langsung disampaikan pada Pemkot," jelasnya. (Radar Tegal, 22 Juli 2010).

Fikri menyampaikan materi reses menggunakan bahasa Indonesia dengan serius jarang sekali ada humor yang menyertainya dan cara bahasanya singkat padat jelas. Seingat nara sumber, Fikri tidak pernah menggunakan bahawa Jawa dialek Tegalan[71], tempat asalnya. *"Mungkin karena Pak Fikri adalah orang eksakta. Ia kan berasal dari teknik elektro, sehingga gaya komunikasinya tidak bersayap dan langsung to the point",* kata Anton.

Ia sering menyampaikan materi diselingi dengan senyuman, atau pada saat mendengarkan keluhan/aspirasi dari masyarakat. *"Saat ia berkomunikasi, bahasa*

tubuhnya yang jalan ya senyumnya itu, mungkin malah bisa disebut sebagai kelatahan tubuhnya", terang Syahri.

Pandangan berbeda disampaikan Anton, menurutnya Pak Fikri mempraktekkan Hadist Nabi yang mengatakan bahwa dalam ajaran Islam, senyum itu adalah ibadah karena adalah bagian dari sedekah. pengertian sedekah tidak terbatas hanya pada materi saja. Senyum merupakan sedekah yang paling mudah tetapi juga bisa menjadi sangat sulit diberikan oleh seseorang.

> *"Pada dasarnya, semua orang bisa tersenyum dengan siapa saja. Namun, kadang karena ketidakseimbangan fisik maupun mental membuat sebagian orang sulit untuk tersenyum. Senyuman itu dapat menggambarkan suasana hati seseorang. Senyuman yang tulus dari seseorang memberikan refleksi kejiwaan positif kepada orang lain. Seorang muslim selalu diajarkan agar memiliki sifat lapang dada dan senantiasa terbuka menebarkan senyuman kepada orang lain*" terang Rahmat.

Saat penyampaian materi reses, Fikri mengungkapkan permasalahan dan menjelaskan materi resesnya sampai detail. Menurut Suharyanto, Pertama-tama, Fikri menjelaskan permasalahan secara umum terlebih dahulu kemudian masuk ke hal-hal yang khusus untuk diterangkan.

Fikri juga pandai merangkai kalimat dan menjelaskan sebab akibat sebuah permasalahan dan cara mengatasinya. Semisal saat menearangkan masalah kenaikan harga bawang yang dialami oleh warga Brebes, ia menguraikan panjang lebar kenapa permasalahan ini terjadi, dari sebab yang ada mulai dari pergantian cuaca yang ekstrim terjadi akhir-akhir ini, permainan harga oleh tengkulak, kelangkaan atau mahalnya harga pupuk, sampai dengan sebab-sebab lain.

Tidak berhenti di situ, Fikri juga menerangkan upaya-upaya cara mengatasinya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam sekalipun.

Dengan kredibilitasnya itu maka orang yakin dengan apa yang dijelaskannya. *"Dengan penyampaian materi yang detail itu, maka akan lebih merangsang para peserta reses untuk berdialog dalam sesi tanya jawab. Selain itu, salah satu tolok ukur sebuah acara reses bisa dikatakan sukses",* kata Suharyanto.

Tak jarang, Fikri menyampaikan materi reses di luar bidang komisinya. *"Walaupun ia sebagai koordinator Komisi A yang membidangi pemerintahan, ia juga hapal data-data di komisi lainnya. Ia tipe orang yang mau terus belajar",* kata Syahri. Contohnya, pada saat pelaksanaan reses hari Kamis 25 Maret 2010 dengan acara Pertemuan dengan Pejabat Pemerintah Kota Tegal, diterima oleh Wakil Walikota Tegal dihadiri oleh Perwakilan Pemerintah Kabupaten Brebes dan Pemerintah Kabupaten Tegal, dinas instansi terkait, bersama-sama dengan para Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, dilanjutkan pertemuan dengan para Pemuka agama, tokoh masyarakat, dan Pemuda di Kabupaten Tegal.

Dalam pertemuan tersebut, ada konstituennya yang mengeluhkan tentang seorang TKI asal Prapaglor, Kabupaten Brebes yang bernama Siti Nani dinyatakan meninggal di Saudi Arabia yang sampai saat ini nasib jenazahnya tidak ada kejelasan apakah sudah dikubur atau masih dirawat oleh pihak pemerintah.

> *Hilangnya TKI ini disampaikan oleh keluarga korban kepada Drs. A. Fikri Faqih pada saat reses anggota DPRD Jawa Tengah kemarin. "Sampai saat ini pihak keluarga mengalami kebingungan karena belum ada kejelasan tindak lanjut informasi meninggalnya Siti Nani tersebut," tegasnya.* (Radar Tegal, 26 Maret 2010).

Dalam hal ini Fikri berharap pihak Pemerintah daerah dalam hal ini dinas tenaga kerja segera berkoordinasi baik dengan Disnaker pusat, kedutaan, serta PJTKI bersangkutan untuk segera mendapatkan kepastian nasib Siti Nani tersebut.

> *“Harus diusut, hanya pemerintah yang bisa melakukan ini, harus ada batas waktu yang diberikan kepada PJTKI untuk bisa melaporkan nasib anak buahnya,” tegasnya. Fikri juga berharap masyarakat mengambil langkah proaktif untuk melaporkan kepada disanker jika ada keluarga yang mejadi TKI, jika lebih dari tiga bulan tidak ada kabar.* (Radar Tegal, 26 Maret 2010).

Contoh lainnya, pada saat pelaksanaan reses hari Jumat, 23 Juli 2010 dengan acara Pertemuan dengan pejabat Kota Tegal, yang diterima oleh Walikota Tegal, Sekretaris Daerah Tegal, Anggota DPRD Kota Tegal, dilanjutkan pertemuan dengan para kader PKS, tokoh masyarakat, tokoh agama, para Pemuda.

Dalam acara tersebut Fikri menerima keluhan dari konstituen soal tingginya biaya pendidikan. Menanggapi hal ini, Fikri meminta agar pemerintah tidak membedakan sekolah negeri dan swasta. Sehingga siswa yang sekolah di swasta juga diperhatikan, agar biaya pendidikannya tak mahal.

> *"Agar tidak ada kecemburuan, maka pemerintah jangan membedakan sekolah negeri dan swasta. Kalau negeri biayanya dibebaskan, maka swasta juga harus dibebaskan," pintanya.* (Suara Merdeka, Sabtu 24 Juli 2010).

Dari ke dua contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa pada saat kegiatan reses walaupun Fikri menyampaikan materi yang sudah dipersiapkan sebelumnya, namun kadangkala muncul pertanyaan dari konstituen di laur materi yang disampaikan. Masalah TKI adalah bidang Komisi B (perekonomian) dan masalah pendidikan adalah masalah Komisi E (Kesejahteraan Rakyat).

Sebagai seorang Ulama, Fikri kadangkala menyelipkan ayat Alqur’an ataupun hadist kepada konstituen. *“Wajarkan, karena selain sebagai Ulama Pak Fikri adalah Ketua DPW PKS Jawa Tengah yang notabenenya PKS adalah partai dakwah”,* terang Anton.

Dalam Anggaran Rumah Tangga PKS Bab II Pasal 3 (antara lain disebutkan): (1) Menyampaikan dakwah dan tarbiyah Islamiyah kepada masyarakat, khususnya umat Islam, secara benar, jelas, utuh dan menyeluruh, (2) Mendorong kebajikan di berbagai bidang kehidupan, (3) Memberantas kebodohan, kemiskian dan kerusakan moral, (4) Menghimpun jiwa dan menyatukan hati manusia di bawah naungan prinsip-prinsip kebenaran, (5) Mendekatkan berbagai persepsi antara madzhab-madzhab di kalangan umat Islam. Dst.

Dapat dipahami Partai Dakwah sebagaimana dimaksud para pendiri PKS adalah sebuah lembaga yang menjadikan partai sebagai sarana atau ’kendaraan’ menyampaikan dakwah dalam segala bentuk dan aspeknya; sehingga dapat dipahami pula bahwa ”Dakwah” bagi PKS adalah ’panglima’ bagi perjuangan menyebarkan nilai dan prinsip kebenaran dan keadilan bagi seluruh umat di Indonesia khususnya.

Namun para narasumber mengatakan, kadangkala materi reses yang ia sampaikan bahasanya agak “ketinggian” bagi konstituen umum dan yang memahaminya hanya para kader dan struktural partai. “Itu tergantung kemampuan individu Fikri ketika menjelaskan kepada konstituennya, Bisa saja kan dengan materi yang agak berat itu, tapi dijelaskan dengan bahasa yang sederhana ? ”, kata Anton.

Anton menjelaskan, proses penyusunan materi reses itu awalnya berasal dari pendapat dan usul-usul seluruh anggota Fraksi PKS. Staf Fraksi tinggal mengolah dan mencetaknya. Jadi itu adalah keputusan rapat. Persoalan kemudian yang muncul bahwa materi reses tersebut bahasanya ketinggian, memang

demikian. Tapi Anton meyakini kalau kader PKS sendiri pasti paham dengan materi reses itu. Dan itu sangat dibutuhkan oleh kader PKS sendiri.

Semisal, pada saat kegiatan reses masa persidangan ke tiga Bulan November 2010. Fikri menyampaikan materi resesnya berupa Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2011. Materi itu berisi : (1) Perbandingan indikator makro utama Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, (2) Indikator strategis lainnya bidang : pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, (3) Evaluasi pendapatan, evaluasi PAD terhadap APBD tahun 2007-2010, (4) Isu strategis Jawa Tengah, (5) Kebijakan Ekonomi Makro dan Prospek Ekonomi tahun 2011, (6) Struktur APBD, (7) Alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi Jawa Tengah, (8) Prioritas dan sasaran RKP 2011, (9) Presentase prakiraan maju program prioritas 2010, (10) Harapan terhadap pembangunan Jawa Tengah. Materi di atas berupa data dan angka-angka pembangunan yang di jilid dalam bentuk buku agenda dan di bagikan kepada konstituen pada saat reses.

Fikri kadang bersikap spontanitas dalam melakukan kegiatan reses. Pernah dalam suatu kali, acara reses yang seharusnya dialog dan temu kader pada hari Jum’at 26 November 2010 dengan acara pertemuan dengan para pejabat pemerintahan, para tokoh masyarakat, para Kader, dan para Pemuda di kantor DPD PKS kota Tegal.

Kemudian atas permintaan peserta reses, karena itu hari Jum’at, Fikri diminta untuk menjadi khotib dan imam sholat Juma’at di Masjid dekat lokasi acara. Dan setelah Sholat Jum’at selesai, ia diminta menyampaikan materi reses di

halaman masjid di dekat kantor DPD PKS Kota Tegal. Karena sering mengikuti kehendak masyarakat inilah, menejemen waktu Fikri kadangkala tidak tepat waktu.

> *"Beliau senantiasa enggan menolak permintaan masyarakat untuk berdialog lebih lama, Pak Fikri memang orang gampangan diajak dialog. Ia terbuka dengan siapa saja termasuk orang yang baru dikenalnya. Menurutnya, tugas wakil rakyat sejatinya ialah melayani bukan malah dilayani",* kata Suharyanto.

Walaupun penyampaian materi resesnya kaku, Fikri adalah orang yang suka mendengarkan dan berdialog dengan konstituennya. Ia dengan gampang ditemui dan diajak dialog oleh konstituen pada saat acara reses selesai.

> *"Pak Fikri senang kalau orang ngajak dialog, ngobrol ngalor ngidul, yang ringan-ringan saja sampai masalah yang berat-berat. Ada yang unik, kalau sudah ngobrol bapak sering ngajak tamunya pindah ke warung makan. Kebiasaan bapak kalau makan malah jarang di restoran-restoran besar, ga tau kenapa mungkin lidahnya ga cocok, Pak Fikri itu sukanya makan di warung-warung kaki lima di pinggir-pinggir jalan. Walaupun sudah jadi pejabat, tapi selera makannya masih tetap sama dengan rakyat biasa, itu yang saya salut dari beliau",* Suharyanto menambahkan.

Fikri juga tidak mau menyalahkan pemerintah di saat ada konstituennya yang menanyakan tentang kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat. Karena menurutnya, setelah duduk di DPRD, ia adalah bagian dari pemerintahan. Sehingga, secara etika tidak benar jika ia turut mengkritik ataupun menghujat pemerintah.

> *"Pak Fikri selalu menempatkan dirinya di posisi sebagai bagian dari pemerintah. Kalau ada kebijakan pemerintah ia akan berusaha mengkoreksinya. Menurutnya, tidak baik hanya sekedar mengkritik tanpa memberikan solusi untuk perbaikan",* kata Syahri.

Fikri tidak membeda-bedakan mana warga masyarakat biasa dan mana kader dari PKS dalam memberikan arahan ataupun materi pada saat reses. Dalam pemikirannya, mereka semua adalah konstituennya yang memilihnya pada saat pemilu legislatif 2009 kemarin. Contohnya pada saat pelaksanaan reses hari Rabu, 24 November 2010 dengan acara pertemuan dengan para konstituen, masyarakat, para tokoh agama, Pemuda untuk menyerap aspirasi dan permasalahan, di hotel DIAN Kabupaten Brebes. Pada saat kegiatan tersebut, banyak masyarakat yang datang mengikuti kegiatan reses yang notabenenya mereka bukan berasal dari kader ataupun konstituen PKS.

> *"Di Kecamatan itu, masyoritas penduduknya memilih PDI Perjuangan dalam pemilu Legislatif 2009 kemarin. Namun walaupun mereka orang PDI Perjuangan, uniknya untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah mereka memilih Pak Fikri. pemilu 2009 kemarin memberi pelajaran bagi kita. Partai itu kan hanya baju luar saja tho mas, mereka melihat Pak Fikri dan memilih beliau hanya berdasarkan karena figur dan ketokohan beliau, bukan karena partainya. Nah dari kedekatan mereka terhadap Pak Fikri, maka sebagai imbal baliknya mereka minta perhatian Pak Fikri untuk perbaikan infrastruktur di daerahnya",* terang Suharyanto.

Selain dialog, Fikri mengadakan kunjungan ke lapangan. Pernah dia harus rela membonceng warga naik sepeda motor untuk meninjau daerah terisolir di Dusun Banjarsari, KelurahanRandusanga Kulon Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes yang berjarak 10 KM dari desa kecamatan. Di tengahnya terik matahari ia harus mengikuti konstituennya menggunakan sepeda motor untuk meninjau daerah terisolir.

> *Desa itu termasuk daerah tertinggal karena tidak memiliki akses dan tidak ada listrik. Jalan menuju dukuh itu terbatas, yakni melalui tanggul Sungai Pemali dan tanggul tambak. Jika hujan, sulit bagi kendaraan apa pun untuk melaluinya karena sangat licin.*

> *Penduduk di daerah itu bekerja sebagai buruh tani, buruh tambak, dan buruh nelayan. Rumah mereka kecil dan hanya berdinding anyaman bambu. Jarang kalau ada pejabat yang rela naik motor jauh-jauh untuk mengunjungi daerah terpencil dengan motor",* kata Suharyanto.

Sama dengan Bambang Sadono, dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Fikri juga cenderung memiliki Gaya Komunikasi Dua Arah *(The equalitarian style).* Ciri menonjol dari Fikri adalaha suka mendengarkan dan mudah berdialog dengan siapa saja, termasuk orang yang baru dikenalnya.

3.1.5. Riza Kurniawan : Gaya Komunikasi Melepaskan Diri

Riza Kurniawan adalah politisi paling muda yang duduk sebagai Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah. Kelihaiannya berpolitik sudah terbukti dan teruji ketika dia pernah tersandung kasus narkoba dua kali, yaitu pada tahun 2004 dan 2009 namun ia tetap dilantik menjadi anggota dewan.

Frangky[72] berpendapat, kesuksesan Riza menduduki jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah merupakan sebuah kebetulan semata. Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, katanya, kader partai itu yang dapat menjabat sebagai pimpinan dewan ialah wakil rakyat yang berhasil memperoleh suara terbanyak, melebihi bilangan pembagi pemilih[73].

> *Ia menolak jika keberhasilannya ini dikaitkan dengan kedekatnya dengan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Amien Rais. "Tidak ada kedekatan transaksional antara saya dengan keluarga Pak Amien," kata Riza. Ia mengatakan, akan menyelesaikan secara internal partai, mosi tidak percaya dari sejumlah dewan pimpinan daerah partai itu di tingkat kabupaten dan kota terhadap pengurus wilayah, dalam kasus pencalonan pimpinan dewan ini. "Kalau ada yang menolak surat keputusan DPP, itu berarti makar," katanya.* (Koran Jakarta, 20 Oktober 2009)

Sebagai seorang politisi mudadari PAN[74], ia memiliki gaya komunikasi yang unik sesuai dengan jiwa anak muda. Memang Riza terkenal dengan gaya komunikasinya yang transaksional. Politik transaksional adalah politik pertukaran atau politik dagang. Siapa memperoleh apa dan yang lain dapat apa. Liberalisasi politik yang luar biasa di Indonesia menumbuhsuburkan praktik politik ini. Model politik ini cenderung berakhir dengan kompromi atau akomodasi kepentingan elite-elite politik.

> *"Jadi intinya politik transaksional adalah politik yang dilandasi dengan kepentingan sesaat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Semisal saat pilkada sekarang. Kebanyakan masyarakat kita ga mau nyoblos kalau ga dikasih uang sama tim sukses. Harus ada semacam hubungan yang saling menguntungkan antara kandidat atau politisi dengan rakyat yang diwakilinya ataupun masyarakat umum. Begitu pula setelah politisi itu terpilih, mereka juga harus pandai-pandai merawat orang-orang yang telah memilihnya",* ujar Suharsoyo.

Namun di mata Cahyo[75], Riza adalah orang yang murah hati. Dengan siapa orang yang dikenalnya, ia tak segan untuk membantu. Dia punya naluri yang tinggi untuk membantu orang. Ia tak pernah pikir panjang untuk menyingsingkan lengan bajunya ketika melihat orang kesulitan. Bila diminta bantuan, Riza juga tidak merasa ditodong, apalagi dirampok. Ia pandai *ngopeni* semua orang, itu yang menjadi kunci sukses beliau.

Baginya, bisa membantu orang di jalan kebaikan adalah sebuah kebahagiaan tersendiri. Ketika mendapatkan rezeki lebih, dia menikmatinya dengan bersyukur kepada Sang Maha Pemberi, tidak saja dengan cara berdoa dan merefleksikan rasa spiritualnya dalam kesendirian di kesunyian malam, tapi juga berbagi dengan orang sekitar yang membutuhkan.

> *"Sebagai kader PAN, Pak Riza itu menteladani sifat dari pak Amin Rais yang terkenal dermawan kepada siapa saja, tidak hanya kepada orang yang sudah dikenalnya, tapi juga kepada orang yang baru dikenalnya. Ia terkenal"nyah, nyoh, nyah, nyoh," alias memberi atau membantu orang lain yang membutuhkan.",* tambah Cahyo.

Hakikat sebagai wakil rakyat harus dapat berbuat dan menjadi penyambung lidah aspirasi rakyat. Dewan dituntut punya semacam kegiatan ruang dan waktu untuk konstituen dan masyarakat umumnya di saat reses. Sehingga saat ke Dapil bukan lagi posisi sebagai anggota dewan, tetapi sebagai bagian dari mereka yang harus di bangun ikatan emosional secara terus menerus.

Apalagi dalam kegitan reses, Riza sering memberikan "materi" transportasi yang jumlahnya bervariasi kepada tiap-tiap kelompok. Tapi ia sering memberikan bantuan secara langsung di luar bantuan sosial yang dianggarakan oleh APBD Provinsi Jawa Tengah.

> *"Kadang Pak Riza membagikan kepada konstituen antara Rp. 50.000-Rp.100.000. Tapi malah seringnya ongkos transport diberikan kepada koordinator kelompok untuk selanjutnya dia yang membagikan kepada konstituen. Besarnya bervariasi antara Rp. 500.000-Rp.2.000.000,-, terggantung situasi dan kondisi",* terang Cahyo.

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengharuskan kadernya untuk memanfaatkan masa reses sebagai momen penting untuk berkomunikasi dengan konstituen di dapilnya masing-masing. Manakala kita reses sediakanlah alokasi waktu untuk ke Dapil. Sehingga ada namanya komunikasi konstituen, hal itu sesuai arahan Ketum PAN Hatta Rajasa kepada setiap anggota Fraksi PAN DPR dan DPRD se-Indonesia beberapa waktu yang lalu.

Kegiatan Reses yang dilaksanakan Riza tidak bersifat formal. Tidak ada protokoler acara, tanpa podium, dan sambutan-sambutan. Saat reses, ia belum pernah melakukannya bersama dengan anggota DPR/DPRD Kab/Kota lainnya.

> *"Yang unik, dulu sebelum menjadi pimpinan dewan, Riza mendatangi lokasi reses dengan pakaian santai, sering menggunakan baju biasa dan bercelana jeans atau celana kasual lainnya. Namun sekarang ketika ia sudah menjadi Pimpinan Dewan, ia lebih menekankan kepada penampilannya. Kalau acara reses biasa, ia menggunakan baju safari, tapi ketika mengunjungi pondok pesantren, Riza menggunakan baju muslim",* terang Franky.

Dalam kegiatan reses, Riza menyampaikan materi dengan gaya yang biasa dan tidak menggebu-gebu. Ia memang tidak begitu pandai merangkai kata-kata menjadi kalimat orasi yang indah. Ia lebih banyak diam dan mendengarkan apa yang disampaikan konstituen kepadanya. Syahri menuturkan, *"Saat orasi, Intonasi bicaranya berubah menjadi cepat tapi kurang bisa dipahami oleh audience, malah kalau orang Jawa bilang seperti orang nggremeng* atau *ngedumel*".

Materi reses yang disampaikannya sering terdengar sepotong-potong. Ia menjelaskan permasalahan tidak tuntas sampai selesai. Kadang ia menyampaikan pembicaraan secara tersirat.

> *"Apa yang disampaikan Pak Riza tidak to the point. Kita harus pandai menyerap isi dari maksud perkataannya. Bagi orang yang tidak dan belum mengenal Pak Riza secara dekat pasti mengalami kesulitan menerjemahkan maksud perkataannya. Contohnya, pernah suatu kali pak Riza mengatakan bahwa setelah acara reses di Pemalang, kita langsung ke pondok pesantren. Nah, pondok pesantren yang dimaksud itu harus kita pastikan lokasinya dimana dan acaranya apa di sana",* kata Franky.

Sebaliknya, hal berbeda disampaikan Cahyo yang membantah keterangan di atas, menurutnya itu mungkin karena sifat Pak Riza memang demikian, ia

hanya bicara seperlunya saja dan apa yang ada dalam pikirannya, itulah yang diungkapkannya. Namun keterangan berbeda di sampaikan oleh Suharyoso, menurutnya Riza memiliki keterbatasan intelektual bila dibandingkan dengan pimpinan dewan lainnya.

> *"Apalagi setelah ia pernah mengkonsumsi narkoba. Disadari atau tidak, pemakaian narkoba sangat mempengaruhi kerja otak yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh dan mempengaruhi seluruh fungsi tubuh. Karena bekerja pada otak, narkoba mengubah suasana perasaan, cara berpikir, kesadaran dan perilaku pemakainya",* kata Haryoso.

Dalam menyampaikan materi reses, Riza tidak pernah menyelipkan humor dalam pidatonya. Ia orang yang serius dalam pembawaannya, tapi kadang malah tegang dalam menyampaikan materi. Untuk merangkai kata menjadi kalaimat, Riza sering menggunakan Vokalik "ng".

> *"Mungkin karena ia tidak begitu menguasai materi yang dibuatkan oleh stafnya, jadi ia saking gugupnya bahasanya tidak terstruktur dan campur aduk mana yang materi yang ingin ia sampaikan dan mana yang bukan. Sehingga sulit dimengerti apa yang disampaikannya",* terang Haryoso.

Akhirnya, arah penyampaian materi resesnya menjadi tidak terstruktur dengan rapi dan menjadi sulit untuk ditebak. Ini gaya unik Riza jika dibandingkan dengan pimpinan dewan lainnya.

> *"Kalau orang yang pandai beretorika itu kan menyampaikan secara runtut. Biasanya menerangkan dari hal umum sampai hal yang khusus. Dari point pertama kemudian ke dua, dan seterusnya. Tapi kalau Riza tidak demikian, ia menerangkan pointersnya saja, bukan penjelasan dari pointers. Itu pun tidak berurutan",* terang Syahri.

Materi kegiatan reses yang disampaikannya berupa makalah yang disusun dengan judul : (1) Pelaksanaan reses tanggal 22-27 Maret 2010 : Jawa Tengah Dalam Menghadapi ACFTA, (2) Pelaksanaan reses tanggal 19 - 24 Juli 2010 : Kebijakan pemberdayaan UMKM dan koperasi guna menggerakkan ekonomi

rakyat, (3) Pelaksanaan reses tanggal 22 – 27 November 2010 : Pemanfaatan lahan kering untuk pengembangan usaha tani terpadu.

Riza membagikan materi reses yang telah dipersiapkan itu kepada peserta reses. Ia tidak menyampaikan/menjelaskan materi reses yang di bagikan tersebut secara tuntas. Malah kadang ia menyuruh konstituennya untuk membaca sendiri materi yang di bagikan itu.

"Itu materi reses silahkan di baca sendiri-sendiri, jika ada yang kurang paham silahkan untuk bertanya", demikian kata Cahyo menirukan Riza menyampaikannya dalam bahasa Jawa *Ngoko* kepada konstituennya pada saat kegiatan reses. Dengan gaya demikian, Riza dianggap memiliki rasa percaya diri yang berlebihan di mata konstituennya.

> *"Memang kadang dalam situasi seperti ini, seorang anggota dewan yang mendatangi lokasi reses dianggap oleh konstituen sebagai dewa yang turun dari langit untuk menolong umat manusia, atau seperti sinterklas yang datang membagi-bagikan hadiah berupa bantuan sosial",* kata Suharyoso.

Namun, kelemahannya saat menyampaikan materi, ia tidak mengungkap data secara gamblang. Riza terlalu berhati-hati dalam menyampaikan materi reses kepada konstituennya. Walaupun ia membawahi komisi C dan D DPRD Provinsi Jawa Tengah tapi ia kurang begitu memiliki perbendaharaan data terkait komisi yang di bawahinya itu.

> *"Mungkin baginya data adalah urusan dapur, dan tidak harus orang banyak tahu soal data termasuk masalah lika-liku bantuan sosial dari DPRD. Ia banyak belajar dari ke dua kasus yang menimpanya dulu, sehingga setelah itu membuat Riza sangat berhati-hati",* kata Syahri.

Syahri menambahkan, Riza setelah menjadi pimpinan dewan, ia tidak *ceplas-ceplos* menyampaikan pernyataan. Riza hanya menyampaikan pernyataan

atau arahan kebijakan yang sesuai dengan komisi yang di bawahinya yakni Komisi C (Bidang Anggaran) dan Komisi D (Infrastruktur). “Karena mengemban posisinya itu, ia sekarang lebih kelihatan birokratis”, tambah Syahri.

Di sisi lain saat pelaksanaan reses, konstituennya tidak pernah menanyakan masalah kasus yang pernah di hadapinya. Malah konstituen sering mengucapkan terimakasih saat acara dialog atas bantuan sosial yang telah diberikan, pertanggungjawaban kepada Riza secara lisan, dan sekaligus harapan untuk diberikan bantuan sosial lainnya.

Namun, ketika ada pertanyaan dari konstituen dimana ia belum mengetahui jawabannya secara pasti, ia secara jujur tak segan mengatakan belum mengetahui jawaban yang pasti. Atau Riza lebih memilih diam dan tidak berkomentar.

Riza lebih banyak menjelaskan materi di luar materi yang disusun di atas. Semisal, ia lebih sering menjelaskan seputar partai yang disampaikannya secara ringan. Termasuk kesipan PAN dan konstituennya menghadapi Pilkada di Kota Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.

Semisal, saat reses Hari Rabu tanggal 24 Maret 2010 dengan acara Penyerapan aspirasi dengan konstituen di Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan Reses di Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan yang dihadiri 100 orang.

Peserta yang hadir adalah sejumlah kader dan simpatisan PAN Kecamatan Pekalongan Timur serta tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat desa-desa di Kecamatan Pekalongan Timur dan sekitarnya. Acara reses pertemuan dengan

konstituen dilaksanakan di Kantor DPC PAN Pekalongan Timur. Dalam pertemuan tersebut banyak usulan-usulan dari masyarakat mengenai pembangunan jalan, saranda pendidikan dan ibadah, serta berbagai usulan lainnya.

Di acara tersebut, Riza menyampaikan sosialisasi tentang Pilkada Kota Pekalongan yang akan dilaksanakan tanggal 16 Juni 2010. Di mana DPC PAN Kota Pekalongan mencalonkan KH. Achmad Mufakhir dan Masroh, SH[76] sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan. Riza juga meminta totalitas konstituennya untuk mendukung pasangan tersebut.

Juga pada saat pelaksanaan Reses Hari Kamis tanggal 22 Juli 2010 dengan acara Penyerapan aspirasi dengan konstituen di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang. Reses di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang dihadiri 100 orang. Peserta yang hadir adalah sejumlah kader dan simpatisan PAN Kecamatan Comal serta tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat desa-desa di Kecamatan Comal dan sekitarnya. Acara reses pertemuan dengan konstituen dilaksanakan di Gedung Balai Pertemuan Muhammadiyah Comal.

Dalam pertemuan tersebut banyak usulan-usulan dari masyarakat mengenai pembangunan jalan, sarana pendidikan dan ibadah, serta berbagai usulan lainnya. Selain itu acara juga diisi dengan kegiatan dialog dan tanya jawab tentang berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, dimana dalam dialog tersebut akan menjadi acuan Anggota DPRD Prov. Jateng untuk memberikan tanggapan dan menerima berbagai aspirasi masyarakat.

Pada acara ini, Riza juga mengingatkan dan meminta kesiapan kader dan simpatisan PAN untuk mensukseskan pasangan dr. Kun SW, SpB-Endang

Purwanti[77] menjadi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pemalang yang diusung bersama oleh PAN dan PKS. Pilkada Pemalang diselenggarakan pada tanggal 31 Oktober 2010.

Saat acara formal dialog, biasanya konstituen menyampaikan aspirasinya. Mulai dari permintaan perbaikan infrastruktur, bantuan sosial keagamaan, sampai keluhan soal kesulitan keuangan untuk mengkhitankan anak. Untuk menampung aspirasi dari para konstituen, Riza menyebarkan kertas kepada hadirin untuk menuliskan aspirasi. Aspirasi yang ditampung tersebut kemudian ditindaklanjutinya. Jika itu menyangkut dana Bantuan Sosial yang dianggarkan APBD, ia akan mengawalnya. Dan jika itu menyangkut kepentingan pribadi, ia tak segan untuk merogoh koceknya sendiri untuk membantu. Franky mengatakan, "*Saat itu, tetap saja dia diam dan banyak mendengar. Malah untuk membuang suntuknya kadangkala ia tidak fokus memperhatikan pembicaraan orang. Ia lebih asyik bermain dengan handphonenya".*

Tapi satu yang selalu dilakukan Riza, ia tidak pernah berjanji kepada konstituen. Terkesan ia menghindari untuk memberikan janji bagi konstituen. Riza lebih menyukai komitmen dari kosntituennya. Menurutnya, komitmen lebih penting daripada hanya sebatas janji.

> *"Bagi Pak Riza, kalau orang sudah berjanji, maka janji itu adalah hutang yang harus dipenuhi. Dan sebaliknya jika janji itu diiyakan, konstituen akan mengejar sampai terpenuhi janjinya itu. Mungkin ibaratnya, mereka akan mengejar sampai liang kubur. Kalau komitmen kan lebih ditekankan kepada tindakan, nah kalau janji kan hanya sebatas ucapan saja. Banyak kan sekarang politisi kita yang hanya berjanji saja dan tidak mau menepatinya. Nah kalau bapak pengennya membangun sebuah komitmen antara dirinya dengan konstituennya. Jadi saling menguntungkanlah man kalau komitmen itu. Kalau janji kan yang untung hanya orang yang diberi janji. Makanya janji itu hutang. Tapi kalau komitmen itu semacam*

pekerjaan yang dikerjakan bersama-sama dan saling menguntungkan. Saya pikir itu yang lebih penting", terang Franky.

Kadang, sebelum acara dialog dan temu kader selesai ia bergegas untuk meninggalkan lokasi acara terlebih dahulu. Untuk menyiasatinya, Riza memberikan banyak alasan agar ia bisa meninggalkan lokasi reses lebih cepat. Selanjutnya panita lokal yang akan meneruskan jalannya kegiatan reses sampai selesai.

"Pak Riza bukan tipe orang yang betah berlama-lama dalam sebuah forum. Jika forum berlangsung lama, ia tampak gelisah dan sangat kelihatan dari mimik wajahnya. Banyak cara menyampaikan alasan (basa-basi politik) untuk segera meninggalkan ruangan. Mulai dari alasan ada rapat di tempat lain, di tunggu orang DPP, ditunggu bapak Bupati/walikota, dan lain-lain", kata Cahyo.

Riza memiliki kelatahan tubuh berupa gelengan kepala, dan hidung seperti orang orang kena flu. Kelatahan tubuh itu berlangsung setiap saat. Saat ia berkomunikasi, orang lain menganggapnya kurang sopan. Namun para narasumber memberi penjelasan lain terkait kelatahan tubuhnya itu. Mereka menganggap itu adalah ciri khas Riza yang unik. Malah konstituennya di Dapil X (Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, Pemalang, dan Batang), menganggap kalau bukan latah seperti itu malah bukan jatidiri seorang Riza. Konstituennya menganggap kelatahan itu lumrah bagi yang sudah mengenalnya.

"Tapi kadang dengan kelatahannya itu, materi seserius apapun yang disampaikan Riza dalam suatu forum reses malah dianggap audience tidak serius. Kadang kelatatahan tubuh itu mengganggu. Orang mengira ia sedang melawak (memberi humor) ditengah penyampaian materi, padahal ia sedang serius menerangkan sebuah materi", kata Syahri.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Riza cenderung bergaya Komunikasi Penarikan Diri *(The withdrawal style)*. Dalam gaya komunikasi ini,

akibat yang muncul jika gaya ini digunakan adalah melemahnya tindakan komunikasi, artinya tidak ada keinginan dari orang-orang yang memakai gaya ini untuk berkomunikasi dengan orang lain, karena ada beberapa persoalan ataupun kesulitan antarpribadi yang dihadapi oleh orang-orang tersebut.

3.2. Faktor Penghambat Gaya Komunikasi Politik

Penjaringan aspirasi masyarakat membutuhkan waktu yang cukup lama dan secara berkelanjutan. Pada saat masa reses, masyarakat belum terlalu paham tentang apa yang mereka butuhkan dan bagaimana realisasi dari keinginan mereka. Ada banyak proses yang harus dilalui oleh sebuah keinginan masyarakat untuk menjadi kebijakan. Salah satunya adalah pelaksanaan reses oleh anggota dewan untuk menjaring aspirasi masyarakat yang akan diteruskan menjadi sebuah kebijakan.

Pertemuan anggota dewan dengan konstituen dilakukan ketika masa reses. Waktu yang terbatas dengan hanya 6 hari di setiap resesnya menyebabkan anggota dewan dan masyarakat harus pandai-pandai memanfaatkannya. Banyak permasalahan yang timbul ketika reses yang dihadapi baik oleh anggota dewan maupun oleh masyarakat. Beberapa faktor penghambat ketika anggota dewan bertemu dengan konstituen adalah sebagai berikut :

3.2.1. Hambatan dari pengirim pesan :

3.2.1.1. Keterbatasan Waktu

Pertemuan anggota dewan dengan konstituen telah diatur dalam UU maupun tata tertib DPRD. Pertemuan dilakukan ketika reses. Waktu reses yang hanya 6 hari dan dibagi kedalam beberapa kecamatan membuat komunikasi berjalan kurang baik. Atau dalam acara pertemuan dan dialog umumnya hanya berlangsung maksimal 3 jam dan acara kunjungan ke lapangan yang tidak lebih dari 1 jam. Sehingga dalam dialog masih dirasa kurang oleh konstituen. Di pihak lain dari pimpinan dewan juga ada yang membatasi diri untuk berdialog lebih lama dengan konstituennya.

Keterbatasan anggota dewan bertemu dengan konstituennya menyebabkan banyak aspirasi masyarakat yang kurang tertampung seluruhnya sehingga terbatasnya sarana yang dimiliki pemerintah provinsi menyebabkan aktivitas komunikasi politik yang dilakukan anggota DPRD relatif terbatas untuk menjangkau masyarakat di sekitar provinsi Jawa Tengah.

Para narasumber mengatakan, waktu yang terbatas dengan hanya 6 hari saat reses, Kesempatan anggota DPRD yang melakukan reses dan kembali ke daerah pemilihannya harus dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Apalagi waktu reses dewan yang sangat terbatas yang digunakan untuk menyerap aspirasi dari bawah.

Menjadi wakil rakyat tidak hanya sebatas bertemu dan berjabat tangan dengan masyarakat, tetapi harus mengetahui dan merasakan langsung apa yang

dialami masyarakat di pelosok-pelosok desa. Oleh karena itu, mengetahui isi hati masyarakat merupakan keniscayaan yang tak bisa ditawar. Itu bisa dapat dilakukan dengan pengoptimalan saat reses. Kalau memnag sudah ditetapkan bahwa reses hanya 6 hari, maka itu yang harus dioptimalkan fungsi dan kegiatannya.

Tidak mudah memang menjadi wakil rakyat itu. Selain harus berjibaku dengan rutinitas di DPRD, seorang anggota legislatif harus mampu membagi waktunya dengan para masyarakat yang diwakilinya. Masyarakat harus disentuh hatinya dan dipeluk keinginannya untuk kemudian diejawantahkan di parlemen. Sekretariat DPRD telah mengalokasikan waktu khusus bagi para anggota legislatif guna menyabangi masyarakat, yaitu reses.

Di sinilah saat reses kemudian dibutuhkan kemitraan sejati antara masyarakat dan anggota dewan. Kemitraan sejati ini merupakan sesuatu yang nicaya dalam menumbuhkan relasi yang mutualisme simbosis. Keterbukaan dan kerelaan waktu untuk terus berbagi menjadi syarat utama dalam membangun dan melestaraikan hubungan yang simbiosis mutualis itu. Inilah barangkali aplikasi nyata dari adagium berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, berat sama di pikul, dan ringan sama dijinjing.

3.2.1.2. Kurang Menghargai Orang

Kegiatan reses yang dilakukan oleh pimpinan dewan kadangkala dirasakan oleh konstituen kurang menghargai mereka atas kehadirannya di acara reses. Semisal kecenderungan Murdoko menyuruh orang untuk menggantikan dia berbicara di depan konstituen dipandang dari sisi etika adalah kurang etis. Dalam tataran

normatif, kedatangan konstituen dalam kegiatan reses Murdoko adalah untuk mendengarkan arahan, petunjuk, dan intstruksinya. Karena selain ia sebagai Ketua DPRD, ia juga adalah ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah. Sama halnya dengan Riza Kurniawan ketika ada dialog dengan konstituen, ia lebih fokus dengan bermain handphone dan sering ingin tergesa-gesa meninggalkan tempat acara lebih dulu adalah bentuk kurang menghargai kedatangan konstituen.

Dalam berpakaian, Murdoko dan Bambang Sadono ketika mengunjungi pondok pesantren yang tidak menggunakan pakaian muslim dan peci. Seharusnya mereka dapat menempatkan dirinya sesuai dengan budaya pondok pesantren. Dengan cara berpakaian yang benar dan sesuai (baju muslim dan peci) adalah untuk menghargai pondok pesantren.

Atau Fikri Faqih yang memaparkan materi reses yang bobotnya berat. Mungkin bagi kader PKS yang memiliki kharakteristik masyarakat perkotaan dan berpendidikan tinggi tidak masalah ketika diberikan materi reses yang menyangkut data statistik pembangunan Jawa Tengah. Tapi ketika reses yang dihadiri oleh masyarakat di luar kader PKS itu akan menjadi hambatan.

Seharusnya, di era sekarang ini Anggota DPRD menyadari betapa pentingnya konstituen bagi mereka. Konstituen sekarang mulai cerdas dalam memilih dan memilah mana aspirasi politik yang baik bagi mereka dan mana yang tidak. Dengan sistem politik sekarang ini di mana pesta demokrasi di laksanakan beberapa kali membuat masyarakat semakin dewasa dalam berpolitik. Paradigma dulu yang menempatkan anggota dewan ibarat dewa yang turun dari langit yang harus dipatuhi sebagai *sabda pandhita ratu* haru diubah. Sekarang bukan

konstituen yang membutuhkan anggota dewan tapi anggota dewanlah yang butuh konstituen.

3.2.1.3. Perbedaan Budaya

Seorang pimpinan dewan yang yang biasa menemui konstituen yang berkunjung ataupun berdialog dengan dengan konstituen partainya adalah tidak menjadi masalah karena sudah saling memiliki kesamaan budaya, asas, dan ideologi partainya. Namun jika seorang pimpinan dewan harus melakukan kunjungan ataupun melakukan dialog kepada masyarakat yang diluar keanggotaan partainya pasti mengalami sekat-sekat budaya.

Semisal, H. Murdoko yang merasa canggung ketika harus mengunjungi pondok pesantren. Ia harus menggunakan peci dan baju muslim. Ada gegar budaya ketika Murdoko yang biasanya menemui konstituennya dari kaum abangan dan ketika harus bertemu dengan para kyai dan santri di pondok pesantren. Ini terjadi pada saat pelaksanaan reses Hari Kamis 25 Maret 2010 dengan acara Peninjauan di Pondok pesantren Roudlotul Muhtadin Dsn. Blorong Ds. Kaligading Kecamatan Boja Kabupaten Kendal. Dan pada Hari Sabtu, 27 Maret 2010 dengan acara Peninjauan Taman Pendidikan Al Quran Al Muhajirin di Ds. Wonoyoso Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang.

Begitu juga ketika Fikri Faqih mengunjungi basis massa konstituennya di luar massa PKS. Yaitu pada saat pelaksanaan reses di Kecamatan Randusanga Kulon Brebes yang merupakan massa kaum abangan. Ia tampak kesulitan menyesuaikan diri dengan budaya yang ada pada lingkungan konstituennya.

3.2.1.4. Kualitas Suara

Fikri dikaruniai suara yang pelan. Maka ia sangat mengandalkan bantuan sound system untuk berpidato. Tapi saat berkomunikasi itu, konstituen tidak begitu antusias mendengarkan karena menganggap sudah biasa. Anggapan orang tidak ada hal yang baru. Gaya komunikasi Fikri yang monoton itu membuat konstituen jemu di dalam kegiatan reses. Begitu juga dengan Riza Kurniawan yang apabila berbicara terlalu lama malah tidak jelas apa inti pembicaraannya itu.

3.2.2 Hambatan Faktor Pendukung :

Faktor pendukung merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan reses. Bagi konstituen pragmatis, keberadaan faktor pendukung dianggap sebagai pesan utama dalam kegiatan reses, bukan pesan yang disampaikan oleh pimpinan dewan. Faktor pendukung tersebut antara lain :

3.2.2.1 "Materi" Sebagai Ongkos Transport

Dana yang terbatas dari anggota dewan ketika melakukan masa reses, membuat pelaksanaannya menjadi ala kadarnya. Apa yang dilakukan anggota dewan ketika melakukan pertemuan dengan konstituennya hanya sebatas pada pertemuan yang tidak difasilitasi oleh faktor penunjang komunikasi politik yang baik. Pemberian "materi" dari Pimpinan Dewan kepada konstituen merupakan media untuk mempermudah menarik konstituen agar datang dalam acara kegiatan reses. Padahal Biro Hukum dan Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) Depdagri melarang penggunaan "materi" sebagai pengganti transpor tersebut. Dua

lembaga itu tidak menemukan aturan penggunaan "materi" transport bagi konstituen yang hadir dalam reses.

> *"Daripada bermasalah, diputuskan pada reses nanti tidak ada "materi" transport bagi konstituen. Dikhawatirkan, lanjutnya, persoalan ini akan berpengaruh pada kegiatan reses. Sebab selama ini setiap kegiatan penyerapan aspirasi selalu ada "materi" transport bagi peserta. Untuk itu, Anggota Dewan harus pintar-pintar menjelaskan kepada konstituen. Jangan sampai kebijakan ini memunculkan pandangan negatif, seperti "materi" digunakan dewan, atau tidak ikut kegiatan karena tak ada "materi" transport", Terang Fikri Faqih.* (Suara merdeka, 30 November 2009).

Dari lima pimpinan dewan yang ada, hanya Bambang Priyoko yang rutin menggunakan "materi" dengan jumlah nominal pasti, yaitu Rp. 50.000,- setiap orang yang diberikan pada saat acara dialog dan pertemuan konstiuen. Murdoko dan Riza Kurniawan juga memberikan "materi" kepada konstituen namun dengan kisaran di bawah Bambang Priyoko. Pemberian "materi" tersebut merupakan media perantara untuk menarik konstituen/masyarakat umum untuk datang ke lokasi reses. Menurut para narasumber, Tidak ada jaminan ketika pimpinan dewan tersebut yang biasa memberikan "materi" kepada konstituen kemudian menghapuskannya, maka bisa dipastikan acara reses akan sepi.

3.2.2.2. Hiburan

Sarana hiburan yang disuguhkan pada saat reses semacam organ tunggal dan samroh terbukti mampu untuk mencvairkan suasana reses, sehingga reses tidak berjalan kaku, formal, dan monoton. Namun hanya Murdoko yang sering menggunakan sarana ini untuk menghibur konstituennya. Tapi secara ekstrim, penyediaan sarana organ tunggal menjadi sebuah kewajiban bagi konstituennya

dan apabila tidak ada, maka mereka menuntut untuk meminta ganti dengan yang lain, miras misalnya.

Untuk samproh atau qosidah memang jarang di tampilkan dalam pelaksanaan reses. Tercatat cuma Fikri Faqih dan Bambang Sadono yang pernah disambut oleh samproh saat melakukan kunjungan ataupun dialog di pondok pesantren.

> *"Samproh itu kan kesenian yang di gunakan sebagai sarana dakwah. Sekarang memang ada pergeseran fungsi dari fungsi awalnya itu. Rebana ataupun Samproh di tampilkan sebagai hiburan dalam suatu acara, seperti pernikahan, khitanan, tujuh bulanan, dll. Termasuk ketika ada kunjungan pejabat (anggota dewan) di pondok pesantren misalnya. Agak kurang pas ketika dalam kedatangan anggota dewan ke pondok pesantren, kesenian rebana tidak ditampilkan",* terang Nanang[78].

3.2.2.3. Makanan

Makanan merupakan salah satu hal yang wajib di sajikan dalam acara reses. Ada yang hanya berupa snack ataupun makan besar. Untuk konstituen P.Murdoko lebih sering menyajikan makan besar selain snack dengan menggunakan sistem prasmanan. Beda dengan Fikri Faqih dan Bambang Sadono yang sering melakukan reses di rumah penduduk. Makanannya ala kadarnya yang di sajikan tuan rumah.

Penyediaan makanan ini adalah sebuah etika tergantung situasi dan tipologi konstituen masing-masing. Yang unik, ada konstituen yang datang hanya untuk menikmati makanan dan membungkusnya untuk di bawa pulang. Mereka tidak peduli kegiatan reses itu apa, yang penting datang duduk diam mendapatkan "materi" dan perut kenyang.

3.2.2.4. *Sound System* dan Proyektor

Ketersedian *Sound System* merupakan hal yang penting bagi sebuah kegiatan reses. Contohnya kegiatan reses yang dilaksanakan Bambang Sadono di Kedungjati yang mengalami Sound System rusak. Walaupun kegiatan di dalam rumah dan nada suara Bambang Sadono cukup keras tapi suara tersebut tidak terdengar oleh konstituen yang berada di luar rumah.

Atau Fikri Faqih yang di karuniai suara yang pelan, ia sangat tergantung dengan ketersediaan *sound system* dalam suatu acara. Namun sebaliknya, *sound system* malah bisa menjadi pengganggu bagi Riza Kurniawan ketika menerangkan suatu masalah yang pelik, *sound system* bisa menampilkan kekurangmampuan dirinya saat berpidato.

Bambang Sadono merupakan satu-satunya pimpinan dewan yang sering membawa perlengkapan presentasi (proyektor dan LCD) pada saat reses. Walaupun terkesan *over* karena ia presentasi di masyarakat pedesaan, namun adanya LCD merupakan sarana yang menunjang pesan komunikasinya sampai kepada konstituennya.

Namun, pernah dalam kegiatan reses pada hari Jumat tanggal 23 Juli 2010 dengan acara Penyerapan Aspirasi Konstituen di Sekretariat partai Golkar Kecamatan Rembang Kota Kabupaten Rembang, LCD digunakan tersebut tidak berfungsi. Akhirnya materi yang disampaikan hanya sepotong dan tidak tuntas.

3.2.3. Hambatan media

Dalam kegiatan reses, peranan media komunikasi sangatlah penting agar pesan yang disampaikan oleh pimpinan dewa dan diterima dengan baik oleh konstituen. Ada dua macam media komunikasi yang dilakukan oleh pimpinan dewan dalam pelaksanaan kegiatan reses. Pertama media yang digunakan pada saat acara reses itu sendiri, semisal : sound system, pemberian "materi" transport, hiburan, dan makanan. Yang kedua adalah media yang digunakan untuk mempublikasikan kegiatan reses, yaitu media massa.

Lemahnya dukungan media massa untuk mengamplifikasikan kegiatan komunikasi politik pada saat pelaksanaan kegiatan reses pimpinan DPRD Provinsi Jawa Tengah menjadi hambatan tersendiri. Tercatat hanya Bambang Sadono dan Fikri Faqih yang mengajak wartawan untuk mempublikasikan kegiatan reses mereka di tengah masyarakat. Bambang Priyoko hanya sekali mengajak wartawan. Sedangkan Riza Kurniawan dan Murdoko tidak pernah mengajak wartawan terutama media cetak.

Memang tidak ada kewajiban untuk mempublikasikan pelaksanaan dan temuan hasil reses di media massa, namun dengan dimuatnya kegiatan reses tersebut di media massa, maka secara langsung maupun tidak langsung masyarakat akan mengetahui kiprah dan kinerja anggota dewan yang bersangkutan. Minimnya publikasi ini membuat masyarakat apatis dan tidak mengetahui secara pasti informasi program pembangunan dan pentingnya kegiatan reses.

3.2.4 Hambatan dalam bahasa dan sandi

Hambatan terjadi dalam menafsirkan sandi/ bahasa tubuh/isyarat yang dilakukan komunikator oleh si penerima. Hambatan ini muncul ketika pesan yang disampikan oleh pimpinan dewan di tafsirkan berbeda oleh konstituen. Yang sering terjadi adalah pada saat kegiatan reses yang dilakukan oleh Riza Kurniawan. Ketika ia menerangkan sebuah persoalan dengan serius tetapi disalah tafsirkan oleh konstituen. Hal disebabkan oleh kelatahan tubuhnya yang mengganggu. Ia menerangkan serius malah dianggap *guyonan*. Riza juga menerangkan suatu materi secara tidak utuh. Hanya sepotong-sepotong. Secara tidak sadar ia menggiring konstituennya untuk berfikir menginterpretasikan maksud pembicaraannya. Bagi yang sudah mengenal Riza secara dekat, tentu paham dengan maksud pesan yang disampaikannya. Tapi ketika massa konstituennya adalah masyarakat umum, ini menjadi hambatan tersendiri.

3.2.5. Hambatan dari audience

Misalnya kurangnya perhatian pada saat menerima / mendengarkan pesan, sikap prasangka tanggapan yang keliru dan tidak mencari informasi lebih lanjut. Kurang mendengarkan

3.2.5.1. Kurangnya Partisipasi Konstituen

Secara normatif, pada saat pelaksanaan reses anggota dewan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak kecamatan ataupun kelurahan tentang perihal kedatangan mereka. Pihak kecamatan ataupun kelurahan akan mengundang

perwakilan masyarakat untuk berdialog dengan masyarakat tanpa menutup pada masyarakat yang lain untuk hadir. Sosialisasi telah dilakukan oleh anggota dewan namun pada pelaksanaannya masyarakat yang hadir kurang dari yang diharapkan.

Namun kenyataan yang terjadi sekarang adalah, para anggota dewan melakukan kegiatan reses dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan struktur partainya di tingkat bawah (tingkat kabupaten/kota, kecamatan, dan desa). Mereka tidak berkoordinasi dengan pejabat pemerintah kabupaten/kota dan kecamatan kecuali yang duduk menjabat posisi itu adalah kader partainya. Yang berbeda dilakukan oleh Bambang Sadono. Karena ia sudah tidak menjabat struktural partai, maka ia lebih sering berkoordinasi dengan tim suksesnya pada saat akan melakukan kegiatan reses.

Dari hasil koordinasi itu maka tim sukses ataupun struktur partai tingkat bawah yang kemudian mengatur jalannya pelaksanaan reses, antara lain waktu, lokasi, acara, sajian makanan dan hiburan, serta pembagian "materi" transport. Untuk itu mereka berkoordinasi dengan staf pribadi pimpinan dewan.

Biasanya, agar tidak malu atau di tegur pimpinan dewan, "panitia lokal" ini melakukan berbagai macam cara untuk mensukseskan kegiatan reses. Banyak sedikitnya anggota masyarakat yang hadir dalam kegiatan reses adalah salah satu tolok ukur keberhasilan pelaksanaan reses. Maka dari itu, mereka berusaha untuk mendatangkan masyarakat ke lokasi reses.

Namun, kesulitan muncul yang dikarenakan masyarakat yang cenderung apatis dan pragmatis terutama dalam kegiatan-kegiatan politik. Pasca reformasi,

kesadaran berpolitik mereka menurun sehingga *greget* kegiatan reses kurang begitu terasa.

> *"Berbeda dengan zaman dulu, ketika ada kegiatan partai politik masyarakat baik itu kontituen maupun bukan, akan datang membanjiri arena pertemuan dengan kesadaran berpolitik yang baik. Sekarang boro-boro mereka mau berpartisipasi, untuk datang saja secara idealis kita sudah bersyukur. Sekarang masyarakat cenderung apatis dan pragmatis",* kata Wirandiyo.

Pragmatisme politik yang ditandai dengan politik uang cenderung akan semakin menguat, apalagi dengan munculnya sikap apatis dari kelompok masyarakat berpendidikan dan kelas ekonomi menengah ke atas. Pragmatisme politik, cenderung dianut masyarakat kelas ekonomi dan berpendidikan rendah. Bagi mereka terpenting, kedatangan mereka ke dalam sebuah kegiatan politik harus mampu memberi keutungan secara finansial walaupun sifatnya hanya sesaat.

3.2.5.1. Rendahnya Motivasi

Partai politik sekarang memang mengalami kekurangan kader idealis. Masyarakat sekarang berpikiran lebih pragmatis dan apatis, ketika mereka datang ke dalam suatu kegiatan poltik, termasuk kegiatan reses adalah dengan motivasi datang untuk apa dan akan mendapatkan apa.

Para narasumber menjelaskan, motivasi pertama konstituen datang ke acara reses adalah karena pemberian "materi" transportasi, syukur kalau ada *doorprize* yang diberikan dari anggota dewan, snack dan makanan yang dihidangkan, hiburan yang disuguhkan saat reses, dan baru yang terakhir adalah penyampaian aspirasi mereka.

3.2.6. Hambatan dalam *Feed Back*

Dalam melakukan komunikasi yang berbicara tentang kebijakan yang berujung pada komunikasi politik, anggota DPRD harus dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa apa yang diinginkan oleh masyarakat dapat atau tidak untuk dilaksanakan. Terdapat dua macam bentuk hambatan dalam proses umpan balik dari gaya komunikasi Pimpinan Dewan ketika melakukan kegiatan reses.

3.2.6.1 Dalam forum kegiatan reses

Pada acara dialog, setelah pimpinan dewan selesai menjelaskan materi reses biasanya dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Secara umum ketika konstituen banyak mengajukan pertanyaan, berarti forum reses itu berjalan dengan sukses. Tapi ketika hanya sedikit konstituen yang mengajukan pertanyaan bisa diindikasikan kegiatan reses itu tidak begitu sukses.

Misalnya ketika pelaksanaan reses yang dilakukan oleh Murdoko yang ada budaya tabu bagi konstituennya ketika harus memberikan pertanyaan dalam forum formal tersebut. Contoh lainnya pada reses Riza Kurniawan yang sering memiliki kecenderungan untuk lebih cepat meninggalkan forum reses sebelum reses itu selesai dilaksanakan.

Tapi para narasumber internal partai menjelaskan, acara reses yang diselipi pembahasan persiapan partai menghadapi pilkada akan meriah karena banyaknya konstituen mengajukan pertanyaan. Biasanya konstituen mengajukan pertanyaan seputar logistik pasangan calon yang diusung partai yang bersangkutan.

3.2.6.2. Lemahnya Follow Up reses

Banyak faktor yang merupakan penghambat bagaimana sebuah aspirasi masyarakat terbuang ketika dalam perumusan kebijakan publik dalam APBD. Salah satunya adalah kemampuan dari pemerintah provinsi yang terbatas untuk merealisasikan semua keinginan dari masyarakat.

Banyaknya permintaan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan ketika masa reses, membuat pemerintahan provinsi harus membuat strategi guna menyelesaikan permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Permintaan masyarakat yang disampaikan kepada anggota dewan adalah seputar pembangunan fisik dan non fisik.

Pembangunan fisik memerlukan dana yang besar untuk direalisasikan. Pembangunan jalan, sekolah, jembatan, serta sarana pelengakap lainnya memerlukan program jangka panjang untuk menyelesaikannya. Banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan apa yang dihadapi oleh Pemerintah dengan dana yang terbatas, sehingga tuntutan dari masyarakat harus segera terealisasi.

[39] Hasil rangkuman wawancara dengan informan dari staf pribadi masing-masing pimpinan dewan.
[40] Wirandiyo, SH, MH, adalah PNS yang bertugas sebagai Sekretaris Pribadi Murdoko di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Tengah.
[41] Abang Baginda, SE adalah Kepala Kesekretariatan DPD PDI Perjungan Jawa Tengah.
[42] Asal muasal Marhaen ini dimulai cerita Bung Karno bahwa Beliau bertemu seseorang yang bernama Marhaen, tinggal di desa Cireundeu-Ciamis, Bung Karno bertanya, saha ngaran, dijawab Marhaen. Iyeu sawah gaduh saha, gaduh abdi, Iyeu cangkul cangkul saha, cangkul abdi, nu ngagarap sawah saha, abdi, lamun panen hasilna kangge saha, kangge abdi (siapa namamu, Mahaen, sawah ini punya siapa, punya saya, cangkul ini cangkul siapa, cangkul saya, yang mengerjakan sawah siapa, saya, jika sawah ini menghasilkan hasilnya untuk siapa, untuk saya). Inilah gagasan Bung Karno mengenai EKONOMI KERAKYATAN atau EKONOMI DEMOKRASI. Marhaen merupakan perwujudan bangsa Indonesia, Sawah merupakan Negara kesatuan dan persatuan Indonesai, Cangkul merupakan Tehnologi yang diciptakan oleh putra putri Indonesia, yang mengerjakan adalah seluruh rakyat Indonesia (semua rakyat harus bekerja dan tidak menjadi pengemis hanya menerima bantuan langsung tunai/BLT), Jika Indonesia berhasil dalam pembangunannya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tapi apa MARHAEN ? Dari sejak Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan akhirnya menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), tetap percaya bahwa MARHAEN merupakan manusia. (Wawancara dengan Abang Baginda).
[43] Nasionalisme-tradisionalisme Jawa adalah cerminan kaum abangan. Pemikiran abangan, dalam perspektif Geertz, sangat mewarnai sebagian besar kehidupan masyarakat Jawa Tengah. Mengacu pendapat Miriam Budihardjo, sebagian besar masyarakat di wilayah ini menganut pemikiran politik nasionalisme radikal-tradisionalisme Jawa.
Kenyataan tersebut terlihat dari hasil pemilihan umum untuk wilayah Jawa Tengah sejak tahun 1955 hingga 2004 yang selalu dimenangi partai beraliran nasionalisme-tradisionalisme Jawa. Kalau dulu aliran ini diwakili Partai Nasional Indonesia (PNI), sekarang representasinya adalah PDI Perjuangan (PDI-P).
[44] Loyalitas buta yang dimiliki kader PDI Perjuangan ini terbukti ampuh dalam memenangkan Pilkada Jawa Tengah tahun 2008. Menjelang Pilkada Gubernur Jawa Tengah, fakta riil di lapangan menunjukkan bahwa masing-masing tokoh PDI Perjuangan ingin maju sendiri-sendiri sebagai Gubernur ataupun wakil gubernur. Untuk menyatukan mereka itu maka, DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah untuk memasang bendera partai di seluruh tempat yang dianggap strategis sampai ke pelosok-pelosok desa.
Pada akhirnya sampai keluarnya SK dari DPP PDI Perjuangan yang mengusung pasangan Pak Bibit dan Ibu Rustri sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah dari PDI Perjuangan. Ketika bendera sudah dikibarkan, berarti semua kepentingan pribadi harus dilepaskan demi kepentingan partai. SK dari DPP tersebut harus dipatuhi dan dijunjung tinggi. (Hasil wawancara dengan Wirandiyo).
[45] Ibnu Syahri adalah wartawan TVRI Jawa Tengah yang sering ikut serta dalam kegiatan-kegaitan reses anggota DPRD Jawa Tengah
[46] Suharyoso adalah wartawan senior, Anggota PWI Jawa Tengah yang setiap hari meliput di DPRD Provinsi Jawa Tengah
[47] Sebagai contoh konkret adalah hubungan antara Murdoko dengan Mardiyo. walaupun secara politik ia berbeda pendapat, tapi karena P Mardiyo itu adalah seniornya maka Murdoko sering berkunjung ke rumah P Mardiyo. Itu yang tidak diketahui publik. Taunya, mereka *eker-ekeran* saja. padahal faktanya tidak demikian. P mardiyo ditempatkan P Murdoko sebagai senior. Sering ia meminta nasehat P Mardiyo. Salah satu yang menonjol dari hubungan ini itu adalah dikembalikannya Panti Marhaen ke PDI Perjuangan Jawa Tengah 13 Oktober 2009. (Hasil wawancara dengan Haryoso).
Seperti diketahui bersama, pengosongan Panti Marhaen oleh pengurus PDI-P adalah imbas kekalahan Ketua DPD PDI-P Jateng yang saat itu dijabat Mardijo dalam pemilihan gubernur Jateng tahun 2003.
Mardijo yang juga ketua DPRD Jateng kalah telak dengan calon incumbent Mardiyanto yang proses pemilihannya dilakukan di gedung Berlian.

Massa pro-Mardijo langsung mengamuk dan membakar atribut partai di Panti Marhaen, termasuk gambar Megawati Soekarnoputri. Sejak saat itu DPP PDI-P langsung membekukan pengurus DPD dan memecat Mardijo dari keanggotaan partai.
Namun dalam sertifikat tertera nama Mardijo, maka bangunan dan tanah di Panti Marhaen sepenuhnya dikembalikan pada yayasan. Bahkan pembentukan Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), dengan pimpinan kolektif provinsi Mardijo, melakukan ikrar di gedung itu.
Sementara kantor pengurus PDI-P Jateng terpaksa berpindah-pindah. (PDI-P Kembali ke Panti Marhaen. (2009). Dalam http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/10/16/84299 /PDI-P-Kembali-ke-Panti-Marhaen. Diunduh pada 15 Agustus 2011 Pukul 20.23)

[48] Pasangan calon bupati Kendal, dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM- H. Muh. Mustamsikin, S.Ag,MSi (Yakin), memperoleh kemenangan yang cukup signifikan dalam pilkada Kabupaten Kendal 6 Juni 2010. Berdasarkan rekapitulasi KPUD Kabupaten Kendal diperoleh, dari total sebanyak 515.070 suara yang terkumpul, pasangan dr. Hj. Widya Kandi Susanti, MM – H. Muh Mustamsikin, S.Ag. Msi; (Yakin) 207.116 suara (43,22 %). Dra. Hj. Siti Nurmakesi – H. Indar Wimbono, ST. MM; (Sinar) 102.677 suara (21,43 %). dr. H. Nur Khadziq Sp.Jp -.H. Mastur Darori SH, Msi; (Kangmas) 98.862 suara (20,63 %). Ir. H. Sugiono, MT – HM. Abdullah, SE; (Giad) 50.039 suara (10,44 %), dan Ir. H. Supriyono, MM – Nasikhin, Jr; (Sunan) 20.501 suara (4,28 %)

[49] Pada pelaksanaan Pilkada Kabupaten Semarang tanggal 31 Juli 2010, pasangan calon bupati Mundjirin-Warnadi (Jiwa) yang diusung oleh partai PDIP, Partai Demokrat, PAN, dan Hanura ini memperoleh 205.388 (44,74 persen) suara. Pasangan tersebut mengalahkan kedua calon lain, yaitu pasangan Subroto-Atika Arisanti (Suka) yang memperoleh 60.559 (13,19 persen) suara, dan pasangan Siti Ambar Fatonah-Wuwuh Beno Nugroho (Ampuh) memperoleh 193.007 (42,06 persen) suara.(sumber Antara.com)

[50] Joko Suranto, Ketua Ranting PDI Perjuangan Bulu Lor, Kota Semarang

[51] Agung adalah PNS staf pribadi H. Bambang Priyoko, SIP di lingkungan DPRD Provinsi Jawa Tengah

[52] Suntoro adalah Staf ahli Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Jawa Tengah

[53] Data dari KPU Provinsi Jawa Tengah 2010, hasil Pilkada Blora, Pasangan Djoko Nugroho dan Abu Nafi (kolbu), meraih 243.724 suara atau 50,74 persen, RM Yudhi Sancoyo-Hestu Bagiyo Sunjoyo (Yes) meraih 197.188 suara (41,05 persen), sedang pasangan Warsit-Lusiana (Wali) hanya mendapatkan 39.444 suara (8.21 persen).

[54] Abu Nafi adalah Ketua Tanfidziah PCNU Kabupaten Blora. Sekarang sebagai Wakil Bupati Kabupaten Blora 2010-2015.

[55] Selain dikenal sebagai produsen jagung nomor dua se-Indonesia, Kedelai Grobogan telah diakui peneliti dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sebagai varietas unggulan, bahkan mendapat rekomendasi dari Menteri Pertanian. Grobogan merupakan nomor satu di Jateng mengenai produksi dan kualitas kedelai. Produktivitasnya sebesar 2,6 ton per hektare. Tahun 2008, kita berhasil mencapai 62 ribu ton dengan luas lahan 24 ribu hektare. Lahan penanaman kedelai tersebar di Kecamatan Pulokulon, Kradenan, Wirosari, Tawangharjo, Ngaringan, Gabus, Purwodadi dan Toroh. Selain itu, mampu memenuhi sekitar 30 persen kebutuhan kedelai provinsi. (Suara Merdeka, 24 Desember 2009)

[56] Kabupaten Pati merupakan salah satu sentra industri pembuatan tepung tapioka yang memakai singkong (Manihot esculenta) sebagai bahan baku. Industri ini banyak menghasilkan limbah padat berupa kulit singkong. Penduduk setempat belum memanfaatkan limbah kulit singkong ini secara maksimal.

[57] Potensi Tebu di Kabupaten Pati : Produksi tahun 2008 sebanyak 52.126 (Ton) dan Lahan yang Sudah Digunakan 10.767 (Ha). (Sumber Data: Statistik Perkebunan 2008 – 2010, Direktorat Jenderal Perkebunan, Departemen Pertanian)

[58] Data Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop dan UMKM) Rembang menyebutkan, luas lahan tambak garam mencapai 1.465 ha. Lahan seluas itu tersebar di Kecamatan Kaliori, Rembang, Lasem, Sluke, Kragan dan Sarang.

[59] Suharyoso adalah wartawan Harian Pelita

[60] Djoemali, S.Sos adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah dari Fraksi Partai Golkar yang berasal dari Daerah pemilihan Jawa Tengah III (Rembang, Blora, Pati, dan Grobogan) sama seperti Bambang Sadono

[61] Maryudi, SH, MM, adalah PNS staf pribadi BS di DPRD Provinsi Jawa Tengah.

[62] Mustofa adalah Ketua Partai Golkar Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan.

[63] Djoemali akhirnya kalah dalam Pilkada Rembang 2010 dan menempatkan dirinya pada posisi terakhir perolehan suara. Hasil Pilkada Rembang Hasil Akhir Perolehan Suara Pemilukada Rembang 2010 :

1. A. Cholid Mukri- Achmad Djoemali 13.306 (3,98%), 2. Mulyono- Imam Baehaqi 13.926 (4,17%), 3. Moch. Salim- Abdul Hafidz 187.106 (55,96%), 4. Yaqut Cholil Q.- Arief Budiman 60.784 (18,18%), 5. Yahya Amin- N. Suryana 59.223 (17,71%). DPT: 458.795 Suara Tidak Sah:11.257 Suara Sah:334.340. Jumlah Total (Suara Sah dan Tidak Sah): 345.602 Partisipasi: 75,3%

[64] Anwar Kholil, Anggota DPRD Kabupaten Rembang dan Ketua Partai Golkar Kecamatan Sulang Rembang.

[65] Tim Sukses Bambang Sadono saat pemilihan Gubernur Jawa Tengah 2008 dan Pemilihan Legislatif 2009

[66] Imam Supardi adalah konstituen Bambang Sadono dari Desa Jambangan kecamatan Tunjungan Kabupaten Blora. Daerah tersebut adalah asal Bambang Sadono.

[67] Anton Purwiyanto adalah staf ahli Fraksi PKS DPRD Provinsi Jawa Tengah

[68] Suhariyanto, SH adalah staf pribadi Drs. Fikri Faqih, MM di DPRD Provinsi Jawa Tengah

[69] Ustad Rahmat Raharjo adalah Ketua DPD PKS Kota Tegal

[70] Batas itu disebut dengan hijab. Hijab adalah penutup / pembatas yang dipasang agar tidak terjadi campur baur antara laki-laki dan wanita. Syariat hijab ini sesungguhnya tidak terbatas pada acara walimah al-urs saja, tetapi pada setiap kesempatan dimana adanya terjadi percampuran laki-laki dan wanita. Secara alamiyah, di masa Rasulullah SAW, para shahabat memang membuat jarak dan tidak bercampur baur antara laki-laki dan wanita. Demikian pula dalam bertamu ke rumah orang, maka laki-laki duduk pada tempat yang terpisah dengan wanita. Jadi PKS dalam konteks sekarang mengimplementasikannya secara formal dalam bentuk pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan perempuan dalam acara-acara formal PKS. (wawancara dengan Anton)

[71] Dewasa ini banyak pelawak yang bukan asli dari Tegal menggunakan bahasa Tegalan untuk bahan lawakan mereka. Ini mungkin yang akhirnya orang berpikiran bahwa dialek Tegalan adalah lucu. Padahal sejatinya, bahasa Jawa dialek Tegalan adalah bahasa yang serius dalam tanda kutip dua sama dengan bahasa daerah lainnya. Hal ini kan juga tercermin dari karakter masyarakat Tegal yang cenderung selalu serius.

Jadi akhirnya masyarakat Tegal malu untuk berbahasa Jawa dialek Tegalan, apalagi kalau sudah keluar dari daerahnya. Seperti di Semarang misalnya, mereka cenderung untuk menyesuaikan diri dengan menggunakan bahasa Jawa dialek wetanan, atau bahasa Jawa yang pakem atau malah menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantarnya.

[72] Franky adalah staf ahli Fraksi PAN DPRD Provinsi Jawa Tengah.

[73] DPP PAN sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) yang mengatur jabatan pimwan didasarkan pada keanggotaan di pengurus partai. Ditambahkan pula,mereka yang berhak menduduki kursi ini adalah peroleh suara terbanyak dalam pemilu dan dan M Riza Kurniawan dari Dapil X peroleh 43.215 suara, tetiggi dari anggota F PAN yang lain. (hasil wawancara dengan Franky)

[74] Sejarah berdirinya Partai Amanat Nasional (PAN) tidak lepas dari hasil Sidang Tanwir Muhammadiyah, 5-7 Juni 1998 di Semarang, Jawa Tengah. Dalam sidang itu, Komisi C merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah agar mempersiapkan partai politik baru. Pada penutupan sidang, Amien Rais mengumumkan akan membentuk partai politik baru. Sejak itulah pertautan sejarah Muhammadiyah-PAN terukir.

Berdirinya PAN merupakan ijtihad politik Muhammadiyah untuk membentuk partai politik baru dengan Amien Rais, mantan ketua PP Muhammadiyah, menjadi ketua umumnya. Inilah yang menyebabkan basis sosial PAN sebagian besar terakumulasi dari warga Muhammadiyah. Sebagian besar fungsionaris PAN, terutama di wilayah dan daerah adalah warga Muhammadiyah.

Setelah PAN dideklarasikan 23 Agustus 1998, dilanjutkan dengan pembentukan PAN di wilayah dan daerah di seluruh pelosok nusantara. Karena para inisiator dan yang terlibat di komite pendirian PAN lebih banyak aktivis dan fungsionaris Muhammadiyah. Tidak heran bila perluasan infrastruktur PAN di seluruh pelosok negeri berjalan karena dibantu jaringan infrastruktur Muhammadiyah. Akar historis ini membuat pernak-pernik kehidupan PAN semakin berwarna.Secara organisatoris, tidak ada hubungan antara PAN dan Muhammadiyah. Namun secara historis, adanya PAN karena adanya Muhammadiyah. Situasi PAN seperti ini mirip dengan keberadaan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Nahdlatul Ulama (NU): adanya PKB karena adanya NU. (Hasil wawancara dengan Franky).

[75] Cahyo W. Prabowo, S.Sos adalah PNS Staf Pribadi Riza Kurniawan di DPRD Provinsi Jawa Tengah

[76] Dalam Pilkada Kota Pekalongan, Incumbent dr. H. Basyir Achmad- HA.Aif Arsyian Junaid, SE yang diusung Partai Golkar memenangkan Pilkada dengan perolehan suara sebesar 43.901 suara (55,72%). Disusul KH. Achmad Mufakhir dan Masroh, SH yang disusung koalisi PDIP, PPP, PAN, PKB, Gerindra, PKNU, P. Demokrat memperoleh 30.318 suara (38,48 %). Dan pasangan Drs. Supriyadi-Drs. Abdul Kholiq dari calon independen memperoleh 4.569 suara (5.80 %).

[77] Dalam Pilkada Pemalang, dimenangkan oleh pasangan H. Junaedi, SH, MM-Mukti Agung Wibowo, ST yang diusung oleh koalisi PDIP, PKB, PPP, dan Demokrat memperoleh 43.691 suara (46,44 %). Disusul oleh H. Sumadi Sugondo-Hj. Sri Sukesi yang disung oleh Partai Golkar dengan 33.720 suara (35.84 %). Kemudian pasangan dr. Kun SW, SpB-Endang Purwanti diusung PAN dan PKS memperoleh 14.588 suara (15.50 %). Terakhir, pasangan Yugo Dwijaya-Sri Hartati yang diusung koalisi 18 Parpol (Gerindra, Hanura, Patriot, dll) memperoleh 2.091 suara (2.22%)

[78] Nanang adalah Santri yang menjadi konstituen Bambang Sadono di Kecamatan Sulang Rembang.